

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 19 TAHUN 2015 TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENATAAN TATA LETAK PASAR MODERN
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Kabupaten Majene)



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Prodi Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan

Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ASNAWI
NIM: 10200114111

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian dan Penataan Tata Letak Swalayan (Perspektif Hukum Islam)”** yang disusun oleh Asnawi, NIM: 10200114111, mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 16 Maret 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Hj. Halimah B, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Kurniati, M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Dudung Abdullah, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hj. Rahmiati, M.Pd.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,

Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M. Ag
NIP. 19731122 200012 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehendak Allah swt. atas segala nikmat-Nya, baik nikmat kesehatan maupun kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian dan Penatan Tata Letak Swalayan Presfektif Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Majene)”** yang merupakan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sholawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menghamparkan permadani-permadani Islam.

Membuat skripsi bukanlah hal yang mudah dan ringan untuk dilakukan, melainkan tugas yang berat dan membutuhkan banyak pengorbanan baik tenaga, biaya dan waktu. Penulisan skripsi ini bukanlah merupakan hasil tunggal, melainkan tidak terlepas dari pemikiran dan budi baik banyak orang. Untuk itu ucapan terimah kasih kepada kedua orang tua yang tak henti-hentinya memberikan ruang untuk menuntut ilmu dan ketabahannya memberikan biaya sampai penyelesaian skripsi ini, ibunda Hj sitti isah dan ayahanda H. Anwar S, pdi yang tak ada henti-hentinya mengirimkan segenap doa dalam setiap langkahku dan restu, kasih sayang serta segala bentuk pengorbanannya yang tidak dapat dibayar dengan apapun. Apa yang diberikan saat ini hanyalah segelintir ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tidak dapat terbendung lagi dan sesungguhnya tidak akan pernah mampu untuk membalas kasih sayang yang telah ayah dan ibu berikan.

Begitu pula, Sodara saya yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat dalam menyusun skripsi ini. Dengan penuh kasih sayang, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan moril dan materil serta doa yang tulus demi kesuksesan selama pelaksanaan proses kuliah dan penyelesaian skripsi ini. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun doa. Karena itu terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil rektor, dan seluruh staff UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang maksimal.

2. Dr. H. Muammar Bakri, Lc. M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini..
3. Dr. Kurniati, M.HI dan Dra Rahmiati, S.Pd., M.Pd. masing-masing selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
4. Dr. Dudung Abdullah, M.Ag dan. Dra Rahmiati, S.pd., M.pd. masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing, memotivasi, serta memberikan banyak pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pembahasan ini.
5. Dr. Hj Halimah B, M.Ag dan Dr. Kurniati, M.Hi,. Masing-Masing Selaku Penguji 1 dan Penguji 2 yang telah memberikan banyak masukan atas tercapainya Penyelesaian Skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Staf Pegawai yang telah membantu dalam kelancaran akademik selama proses penyelesaian skripsi.
7. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepala Dinas DPM-PTSP dan segenap karyawan dan karyawan yang telah membantu dan memberikan izin dalam rangka kegiatan penelitian dan memberikan informasi yang telah dibutuhkan.
9. Seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Teman-teman Angkatan HPK 2014 Kontetusa, dan khususnya HPK C atas kebersamaannya selama ini, karena kalian, sehingga mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan berharga

selama menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

10. Teman-teman seperjuangan saya di Komunitas Rumah Belajar Paradox tempat mengeluh dan meminta saran, khususnya kepada kakanda Abu Bakar Mangun, S.Hi, Irfan S. Hi. M.H, Imam Wahyudi S.E, Kakanda Sulpandi Adriwan S.H, Masykur Al-Farhy S. H, Muh. Sabiq Al-Khair S.H, Andi Reza Putrawangsa S.H, Alamsyah adri S.H, Irfan jaya, S.H dan Seluruh teman-teman KKN Angkatan 58 Dusun Pattunuang Kabupaten Maros, yang pernah mengisi hari-hari suka dan duka selama mengikuti kegiatan KKN selama 45Hari.
11. Terhusus kepada kedua orang tua saya tercinta H.Anwar dan Hj sitti isah yang tanpa henti-hentinya mendoakan dan memberikan semangat, motivasi serta dukung untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah swt. senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya.

Upaya penulisan skripsi ini telah dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu mohon saran atau kritikan dari pembaca untuk lebih menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Samata, 21 Januari 2020

Penulis,

ASNAWI

NIM.102001141

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1-14
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	6
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	15-38
A. Pelaksanaan	15
B. Peraturan Daerah	16
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	16
2. Ruang Lingkup Kepentingan Umum.....	19
3. Prosedur Kewenangan Pengesahan Peraturan Daerah	20
C. Konsep Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar	23
D. Gambaran Umum Tentang Pasar	25
1. Pengertian Pasar.....	25
2. Jenis-Jenis Pasar.....	25
E. Pasar Dalam Perspektif Islam	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39-43
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Instrumen Penelitian	41
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42
 BAB IV EFEKTIFITAS PERDA KABUPATEN MAJENE NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PENDIRIAN PASAR DAN PENATAAN TATA LETAK TOKO SWALAYAN DI TINJAU DAR HUKUM ISLAM	 44-65
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1. Gambaran Umum Kabupaten Majene	44
2. Gambaran DPM-PTSP	48
B. Penerapan Izin Pendirian Toko Swalayan di Kabupaten Majene...	50
C. Faktor Penghambat Pengawasan dan Penataan Tata Letak Toko Swalayan Di Kabupaten Majene	57
D. Pandangan Hukum Islam	63
 BAB V PENUTUP	 66-68
A. Kesimpulan	66
B. Implikasi Penelitian	67
 DAFTAR PUSTAKA.....	 69-71
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>ḍammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah</i> dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR)



ABSTRAK

Nama : Asnawi
Nim : 10200114111
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2015 Dalam Izin Pendirian dan Penataan Tata Letak Pasar Modern Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Majene)

Pokok masalah Skripsi ini adalah bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene nomor 19 Tahun 2015 dalam izin pendirian dan penataan tata letak swalayan di Kabuapten Majene perspektif hukum Islam. Dengan sub masalah yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan Perda Majene nomor 19 tahun 2015 dalam penerapan izin pendirian toko swalayan di kabupaten Majene. 2. Bagaimana Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dan penataan tata letak swalayan dan bentuk Pengawasan pemerintah terhadap perda nomor 19 tahun 2015. 3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Majene.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan teologi normatif syar'i dan pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris. Adapun sumber data penelitian ini ada dua, data primer berupa wawancara dan data skunder terdiri buku-buku, skripsi dan jurnal. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene nomor 19 tahun 2015 dalam penerapan izin pendirian toko swalayan di Kabupaten Majene menunjukkan bahwa penerapan izin pendirian toko swalayan di Majene tetap terlaksana. Akan tetapi penerapan izin pendirian belum begitu maksimal dikarenakan masih adanya pelanggaran-pelanggaran dan poin poin yang belum dijalankan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yaitu pada pasal 12 ayat 4 huruf d yang dilanggar oleh toko swalayan. Sedangkan bentuk pengawasan pendirian toko swalayan dilaksanakan oleh pemerintah setempat dengan 3 bentuk pengawasan yaitu laporan, monitoring, dan evaluasi akan tetapi pelaksanaan evaluasi hanya dilaksanakan apabila ada sebuah laporan dari masyarakat hal ini mengakibatkan ketidak maksimalan bentuk pengawasan pemerintah. Dalam pandangan hukum Islam perlindungan pemberdayaan usaha kecil dan pasar tradisional merupakan aktifitas yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia agar tercapainya kemashlahatan dengan *Ulil amri* dari keputusan Pemerintah tersebut, sesuai dengan *Maqāsid al-Syari'ah*.

Impilkasi Penelitian adalah bagaimana pelaksanaan pendirian pasar swalayan di kabupaten Majene dalam peningkatan kinerja pemerintah dalam monitoring mekanisme pemberian izin toko swalayan,serta perlunya melakukan kinerja secara langsung ke lapangan baik di pasar swalayan maupun pasar tradisional. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan daerah No 19 Tahun 2015 terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha modern dalam menghadapi persaingan pasar tradisional serta perlunya kebijakan pemerintah dalam sistem pengawasan dan penegakan peraturan daerah, maka perlunya pemerintah membentuk zonasi terhadap pasar modern yang ada. Perlunya peningkatan pemahaman mengenai hukum Islam terhadap pasar agar terjadinya kemaslahatan bukan kemudrahatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah agar terjadi kemaslahatan dalam melakukan persaingan usaha sehat menurut pandangan hukum Islam dengan melakukan pendekatan *maqasid al-syariah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut, dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah.¹ Prinsip antara lainya adanya perlindungan serta jaminan hukum bagi setiap warga negara. Salah satunya adalah Undang-undang yang mengatur tentang jaminan keadilan dan persamaan keadilan dan persamaan di hadapan hukum yang merupakan realisasi dari sila pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Dan inilah merupakan pedoman bagi pemerintah.

Negara indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kepada hukum dan dapat diperjelas oleh UUD 1945. Negara kesatuan indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstat) dan tidak berdasar kepada atas kekuasaan belaka (machsstat) yang secara jelas tertuang dalam batang tubuh UUD 1945. Sistem pemerintahan indonesia adalah sistem presidensial dalam arti kepala pemerintahan adalah presiden dan dilain ia tidak bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung kepada dewan perwakilan rakyat kecuali Presiden dibantu oleh wakil Presiden.² Dan ia juga dibantu oleh menteri-menteri negara yang memimpin departement pemerintahan, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dimana presiden meberikan mandat kepada menteri-menteri untuk melaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh presiden.

¹ Zaeni Asyhadie, *pengantar ilmu hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 8.

² Ridawn HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h.17.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu memberikan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah yaitu; Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2) dan (6). Dalam pelimpahan wewenang dan tanggung daerah diberikan untuk mengatur daerahnya masing-masing yang disebut asas desentralisasi.

Sistem desentralisasi dengan diberlakukannya wewenang pemerintah daerah Berdasarkan peraturan No 30 Tahun 20014 tentang adimistrasi pemerintahan izin ialah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan kepada warga masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .mengenai Kebijakan otonomi daerah menjadi salah satu aturan untuk menjadadikan peraturan yang mengikat sejak diberlakukannya perda di berbagai tingkatan propinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Jika kita melihat UU No 12 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah kebijakan ekonomi daerah menjadi salah satu pemicu sejak banyaknya lahir perda di berbagai tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di indonesia Kebijakan tersebut menmbulkan peraturan pendukung untuk meligitimasi peraturan daerah antara lain : UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Sebagai instrumen Hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Kebijakan otonomi Daerah menjadi pemicu banyaknya lahir perda ditingkatan Provinsi dan kabupaten, kebijakan tersebut memunculkan berbagai peraturan pendukung untuk melegitimasi konsep otonomi daerah antara lain : UU No 22 Tahun 2009 dan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dalam bentuk perda.³ Sejalan dengan konsep otonomi daerah yang memberikan Porsi yang besar kepada setiap daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing, salah satu faktor utama dalam merealisasikan konsep otonomi daerah ialah dengan produk hukum perda.

Syarkawi menyinggung pasar modern sebagai jawaban dari pertanyaan salah satu peserta diskusi yang mengangkat masalah keberadaan Pasar Modern yang mendapat sorotan publik Majene saat ini. Publik menyoroti munculnya pasar modern yang dinilai melanggar perizinan yang dimiliki, ada juga pasar modern yang dinilai melanggar jadwal buka-tutup.

Berbicara mengenai pasar, hal ini sudah terjadi jauh sebelum peradaban saat ini dimana pada zaman Rasulullah Pasar memegang peran penting termasuk dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa al-Rasyidin dan sebagian besar sahabat pada usia tujuh tahun Rasulullah saw diajak pamannyayaitu Abu Thalibdaniamulai melakukan perjalanan perdagangan ke negeri syam, dan dari sinilah ilmu perniagaan beliau dapat. Sejalan dengan usia beliau semakin dewasa Rasul semakin giat berdagang. Rasulullah aktif berbisnis termasuk berdagang di pasar-pasar lokal di Kota Makkah.

³ Huma, *Proses Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Teori & Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 88.

Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah/2:198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ
كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ١٩٨

Terjemahannya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.⁴

Semua pelanggaran itu, dinilai publik, akan merugikan pedagang kecil. Muncullah gelombang demonstrasi menuntut pemerintah kabupaten untuk segera menertibkan pasar modern yang melanggar. Sikap pemerintah dalam kasus ini melalui instansi terkait dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) telah mengirim surat teguran terhadap empat toko swalayan di Majene soal jam operasional. Diantaranya, Indomaret, Alfamidi, Toko Dewi dan Toko Sulawesi.⁵

Menjamurnya pasar modern di kota Majene tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Majene dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Aturan yang telah tertuang dalam Perda No. 19 tahun 2015 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern, maka dari itu perlunya kebijakan pemerintah dalam sistem pengawasan serta penegakan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Majene.⁶ Untuk melindungi pedagang kecil maka pemerintah perlu memberlakukan zonasi terhadap pasar modern. Hal ini

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-hadi Media Kreasi. 2014), h. 31.

⁵ Mandar News, *Pendirian pasar modern di kota majene* (diakses pada 10 Agustus 2018)

⁶ Mandarnews.com (diakses pada tanggal 17 Agustus 2018)

disampaikan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI, DR. Muhammad Syarkawi Rauf, SE., ME., dalam diskusi lepas dengan para jurnalis yang bertugas di Majene, Sabtu (28/10) malam.

Syarkawi menyinggung pasar modern sebagai jawaban dari pertanyaan salah satu peserta diskusi yang mengangkat masalah keberadaan Pasar Modern yang mendapat sorotan publik Majene saat ini. Publik menyoroti munculnya pasar modern yang dinilai melanggar perizinan yang dimiliki, ada juga pasar modern yang dinilai melanggar jadwal buka-tutup.

Berdasarkan dengan uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk mengajukan judul penelitian menyangkut masalah ini yaitu ***“Pelaksanaan Perda No 19 Tahun 2015 tentang Izin Pendirian dan Penataan Tata Letak Swalayan di Kabupaten Majene Perspektif Hukum Islam”***

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan pokok permasalahan yaitu: bagaimana Pelaksanaan Perda No 19 tahun 2015 tentang perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern studi kasus di kota Majene (Perspektif Hukum Islam), dengan sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan penerapan Perda No 19 Tahun 2015 dalam pendirian dan tata letak toko swalayan di Kabupaten Majene?
2. Faktor apa yang menghambat efektifitas Perda tersebut?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perda no 19 tahun 2015 dalam kaitan perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil menengah?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Supaya pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan tidak menyimpan maka akan dipaparkan batasan-batasan yang menjadi deskripsi focus dan focus penelitian ini.

1. Fokus penelitian

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendeskripsikan dan memahami penelitian ini maka penulis akan mendeskripsikan beberapa variabel yang dianggap penting:

- a. Pelaksanaan
- b. Peraturan Daerah
- c. Perlindungan dan Pemberdayaan
- d. Pasar Modern
- e. Hukum Islam

2. Deskripsi Fokus

- a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

- b. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2015

Peraturan daerah adalah sebuah produk Peraturan perundang-undangan yang berada pada wilayah daerah yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui persetujuan kepala daerah baik gubernur, bupati/walikota.

1. Bahwa dengan semakin berkembangnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilindungi dan diberdayakan agar dapat tumbuh serta berkembang secara serasi, sinergi dan bersaing secara sehat.
2. Bahwa agar pasar rakyat dapat berkembang secara serasi di tengah-tengah pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, maka perlu dilakukan pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap pasar rakyat serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

3. Bahwa sejalan dengan perkembangan daerah dan meningkatnya aktivitas perdagangan masyarakat serta untuk mengoptimalkan fungsi Pasar Daerah dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan, diperlukan Pasar Daerah yang aman, nyaman dan tertib bersinegri dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan lainnya.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat, dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Majene.⁷

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah adalah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Peraturan daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten kota.⁸ DPRD memiliki kekuasaan yang juga dalam menentukan dalam pembentukan peraturan daerah, karna dilengkapi dengan hak-hak inisiatif dan hak mengadakan perubahan. Bahkan secara yuridis persetujuan itu sendiri mempunyai makna kewenangan menentukan, karna itu tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa tanpa persetujuan DPRD tidak akan ada peraturan daerah.⁹

c. Perlindungan dan Pemberdayaan

Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan toko swalayan. Sedangkan pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar rakyat, kecil, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi salah satu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen fisik tempat agar dapat bersaing dengan toko swalayan. Dan pasar adalah terjadinya interaksi penjual dan pembeli, di dalamnya terdapat tiga unsur yaitu, penjual, pembeli, dan

⁷Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 19 tahun 2015

⁸Zarkasi, Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, <http://Onlin-Jurnal.uja.ac.id>.(diakses pada 30 Juli 2018)

⁹Abdul Latif, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*(Ujung Pandang: Umitoha Ukhuwah Grafika,1997), h. 102.

barang atau jasa yang keberadaanya tidak dapat dipisahkan, pertemuan antara penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli.

d. Pasar Modern

Pasar Modern adalah Pasar yang bersifat modern, dimana barang-barang yang dijual-belikan dengan harga yang pas dengan layanan yang mandiri (swalayan) tempat berlangsungnya pasar ini adalah mall, hypermarket, plaza, supermarket, dan tempat modern lainnya. Pasar modern merupakan sektor usaha ritel, sehingga pasar modern dapat disebut juga sebagai ritel modern atau toko modern.¹⁰

e. Perspektif Hukum Islam tentang Pasar

Pada setiap perekonomian, pasar memegang peran penting termasuk dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah saw dan Khulafa al-Rasyidin dan sebagian besar sahabat pada usia tujuh tahun Rasulullah saw diajak pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan perdagangan ke Negeri Syam, dan dari sinilah ilmu perniagaan beliau dapat. Sejalan dengan usia beliau semakin dewasa Rasul semakin giat berdagang. Setelah sudah menjadi suami Khadijah pun, beliau tetap aktif berbisnis termasuk berdagang di pasar-pasar lokal di kota makkah.

Terkait dengan pasar terdapat transaksi jual-beli, fiqih menyebut istilah jual beli dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata "*al-bay'*" dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Kata *al-bay'* yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli, sehingga dalam adat sehari-hari, istilah *al-bay'* diartikan jual beli.¹¹

Jual- beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dari al-Qur'an. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahanya:

¹⁰Lihat Pasal 1 Nomor 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12 2008 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan Toko Modern.

¹¹ Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 66.

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”.¹²

Berdasarkan kadunganayat di atas,bahwa hkum asal jal beli adalah mubah (boleh). Dalam situasi-situasi tertentu, jual beli yang hukumnya boleh bisa berubah menjadi wajib, yaitu ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok barang menjadi naik). Dalam kondisi seperti ini, pemerintah boleh memaksa pedagang untuk mejual barangnya itu sesuai dengan standar harga sebelum terjadinya pelonjakan (kenaikan) dan pedagang ketika itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

D. Kajian Pustaka

1. Herman Malano, dalam buku yang berjudul *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil* tahun 2011, buku ini merupakan bacaan yang menarik terkait pendalaman pengetahuan atau teori-teori tentang pasar dalam potret ekonomi rakyat kecil. Buku ini terdiri dari 7 (tujuh) bab dengan lengkap sehingga mengantarkan pembaca memahami konsep pasar tradisional dalam potret ekonomi rakyat kecil. Penyajian dalam buku ini terdiri dari: Nasib pedagan pasar tradisional, pasar tradisional, potret buram wajah Negeri, melongok pasar tradisional di luar Negeri, mengkritisi konsep pengelolaan pasar, pedagan dan modal, meningkatkan harkat pedagang, bambu kuning square solusi Pasar kerakyatan. Sementara perbandingan dengan skripsi yang disusun oleh penulis lebih berfokus pada efektifitas perda Kabupaten Majene Nomor 19 tahun 2015 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern.¹³
2. Fahmi Medias, dalam buku yang berjudul *Ekonomi Mikro Islam* tahun 2018, buku ini merupakan yang menarik bagi pembacaa terkait dengan

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta: Al-hadi Media Kreasi. 2014) h. 47.

¹³ Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011).

pendalaman teori-teori tentang ekonomi mikro dalam pandangan Islam. Buku ini terdiri dari 11 (sebelas) bab sehingga mengantarkan pembaca memahami konsep Islam terhadap ekonomi mikro. Penyajian buku ini terdiri dari: ekonomi mikro Islam, konsumen dalam Islam, teori permintaan dalam Islam, teori Utilitas dalam Islam, produksi dalam Islam, penawaran Islami, permintaan dan penawaran menurut ekonomi muslim, kepemilikan dalam Islam, monopoli dalam Islam, *profit and loss sharing*, ziswaf dan perannya dalam pengembangan sektor mikro ekonomi. Kesamaan dalam skripsi yang disusun oleh penulis adalah kajian Islam dalam ekonomi Sementara perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh penulis lebih berfokus pada perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan modern.¹⁴

3. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia, dalam buku yang berjudul *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan* 2011, buku ini merupakan buku yang menarik bagi pembaca terkait dengan pendalaman teori-teori tentang Negara dan pasar dalam bingkai kebijakan persaingan. Buku ini terdiri dari 5 (lima) bab sehingga dapat memperluas teori pembaca tentang Negara dan pasar. Penyajian buku ini terdiri: Negara, pasar, kebijakan, regulasi dan globalisasi. Kesamaan dalam skripsi yang disusun oleh penulis yaitu terletak pada konsep pasar sementara perbedaan dengan skripsi yang disusun oleh penulis terletak pada perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern dalam perspektif hukum Islam.¹⁵

¹⁴ Fahmi Medias, SEI. MSI, *Ekonomi Mikro Islam* (Magelang: Unimma Press, 2018).

¹⁵ Komisi Pengawasan Persaingan Usaha RI, *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan* (Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha RI, 2011).

4. Syaifullah Hasan (2016), dengan judul skripsi *Peran Pemerintah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Makassar*, isi penelitian yang terdapat masalah dalam skripsi ini adalah pemberdayaan pasar tradisional dalam mengembangkan usaha kecil sebagai usaha yang mampu memberikan perlindungan serta pemberdayaan pemerintah dalam mengembangkan, serta pemerintah memiliki peran penting dalam melindungi usaha yang berada dalam lokasi pasar tradisional di kota Makassar. Sedangkan penelitian yang menjadi perbedaan dalam Skripsi ini tentang hadirnya pasar modern sebagai bahan persaingan usaha dan lokasi penelitiannya . namun persamaannya sama-sama fokus kepada peraturan daerah yang akan di kaji mengenai kebijakan pemerintah. Peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai penataan serta jam operasional kerja pasar modern di kabupaten Majene mengenai masalah penataan zonasi pendirian pasar modern di kabupaten Majene dan jam operasional pasar modern.¹⁶
5. Fatmawati (2014) dengan Skripsi yang berjudul *Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Maros*. Membahas tentang Pasar Modern menggunakan prinsip swalayan atau pengambilan barang sendiri. Berbeda dengan pasar tradisional yang melayani langsung oleh pedagang sehingga ada aktifitas tawar menawar yang tidak ditemui pasar Modern. Dalam penelitian ini ada kesamaan dalam pembahasan pasar tradisional sementara perbedaan dengan skripsi yang saat ini disusun yaitu terletak pada efektivitas

¹⁶ Syaifullah Hasan, *Peran Pemerintah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Makassar*, Skripsi (Makassar: Unhas, 2014)

Peraturan Daerah Kabupaten Majene No 19 Tahun 2015 tentang perlindungan , pemberdayaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern.¹⁷

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sarana yang ingin dicapai dari setiap penelitian sebagai pemecahan masalah yang dihadapi dan sekaligus sebagai bahan untuk melakukan pengkajian dari aspek hukum. berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaa penerapan Perda No 19 Tahun 2015 dalam pendirian dan tata letak took swalayan di Kabupaten Majene
- b. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi penghambat efektifitas Perda tersebut.
- c. Untuk mengetahui pandangan hokum Islam terhadap perda no 19 tahun 2015 dalam kaitan perlindungan dan pemberdayaan usaha keci lmenengah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan penelitian

1. Mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian, ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan dan di manfaatkan di dalam penulisan ilmu hukum yang khususnya mengenai peraturan daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi sekaligus sebagai bahan bacaan atau referensi khusus dalam pendidikan ini sekaligus sebagai bahan bacaan pustaka.

b. Kegunaan Praktis

¹⁷ Fatmawati, *Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Maros*, Skripsi (Makassar: Unhas, 2014).

1. Dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang peraturan daerah No 19 Tahun 2015 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait dalam memahami peraturan daerah tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern, di Kabupaten Majene.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau tindakan adalah suatu fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Banyak orang yang mengambil kesimpulan bahwa fungsi manajemen manajemen pelaksanaan merupakan fungsi yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Pimpinan organisasi harus dapat memberikan motivasi sehingga setiap orang mau bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan.¹⁸ Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁹

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula²⁰

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna

¹⁸Alam (*Ekonomi untuk SMA dan MA*) hal. 140

¹⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2002), hal. 70

²⁰ **Abdullah Syukur, 1987. Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"(Ujung Pandang: Persadi.1987), hal 40.**

melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;

- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

B. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan alat untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan peraturan daerah juga menunjukkan ukuran berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya karna dengan peraturan daerah kita bisa melihat masalah masalah yang telah dan akan dilaksanakannya.²¹

Dalam tata urutan peraturan perundang undangan di indonesia, peraturan daerah dimaksud menjadi bagian dalam bentuk perundang undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan terdiri dari:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
- d. Peraturan pemerintah
- e. Peraturan Daerah Provinsi dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam hal ini peraturan daerah secara tata urusan dan hirarki perundang undangan sebagaimana yang diatur dalam undang undang pembentukan peraturan perundang undangan tersebut diatas berada pada urutan paling bawah namun

²¹Misdayanti dan kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah* (Jakarta: Bumi Aksara,1993), h.12.

pengawasan terhadap peraturan perundang undangan lainnya lebih tinggi oleh lembaga pemerintah pusat yang memiliki kapasitas untuk melakukan tugas pengawasan hukum. Pengawasan teknis bersifat evaluasi dilakukan sebelum peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah yaitu pengawasan oleh kementerian.

Dalam Negeri Republik Indonesia dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi. Oleh karena itu peraturan daerah tidak dapat dipandang sebagai produk hukum yang bersifat lokal sehingga tidak perlu pengawasan atau dengan kata lain pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan kewajiban untuk melakukan laporan kepada kelembagaan negara tingkat pusat maupun pada provinsi yang mempunyai kapasitas melakukan tugas tersebut.

Semua bentuk pengawasan yang dilakukan baik oleh kementerian departemen Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung adalah pengawasan yang dilakukan antara lain untuk membandingkan apa yang hendak dijalankan, dilaksanakan, atau diselegarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan melalui peraturan perundangan undangan yang dibentuk dalam rangka kesesuaian dan pencapaian tujuan yang diharapkan. Namun pelaksanaan Mahkamah Agung akan lebih bersifat yuridis menyangkut proses peradilan dalam rangka menguji peraturan perundangan undangan.

Selanjutnya berbicara mengenai pelaksanaan peraturan daerah, bahwa hal tersebut berkaitan erat dengan kewenangan desentralisasi. bagaimana pemerintah sebagai eksekutif dapat menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagai pemerintah daerah. Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang penyelenggaraan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga gubernur, Bupati dan Walikota diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di daerah atas perintah undang-undang.

Peraturan daerah tetap mengacu pada peraturan hukum lebih tinggi di atasnya, sehingga tidak serta merta mengesampingkan aturan aturan yang lebih tinggi. Prinsip peraturan daerah adalah untuk melaksanakan peraturan tersebut. Peraturan daerah yang dibuat oleh suatu daerah, baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah, namun dalam asas hukum memberlakuakannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan menyangkut kepentingan umum.

2. Ruang Lingkup Kepentingan Umum

Pengaturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat

untuk melaksanakan peraturan perundang undangan yang di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing masing daerah. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.²²

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan daerah yang merupakan produk hukum/peraturan yang paling bawah, dapat didefinisikan sebagai peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan.²³ Mengenai ruang lingkup peraturan daerah, dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Menjelaskan bahwa peraturan daerah meliputi,²⁴

a. Peraturan daerah provinsi

Peraturan daerah yang disusun oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur.

b. Peraturan daerah Kabupaten

Peraturan daerah yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota.

c. Peraturan Desa

Peraturan desa yang dibuat pemerintah desa bersama Badan Perwakilan Desa yang tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

3. Prosedur Kewenangan Pengesahan Peraturan Daerah

a. Prosedur

Dalam proses pembuatan peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam suatu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan

²²Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif* (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2003), h. 42.

²³H.A.W. Widjaja. *Otonomi Desa* (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2004), h. 95.

²⁴Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 Ayat 2.

Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Ketentuan tentang tata cara mempersiapkan rancangan perda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota, diatur dengan Peraturan Presiden, sedangkan tata cara mempersiapkan rancangan Perda DPRD diatur dalam peraturan tata tertib DPRD. Rancangan Perda agar memperoleh masukan dari masyarakat atau para pakar maka untuk rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD, sedangkan Perda yang berasal dari Gubernur, atau Bupati/Walikota, disebarluaskan oleh sekretariat daerah.

Muatan materi peraturan daerah, dapat membuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum (*dwangsom*) seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan. Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan, atau denda paling banyak **Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah),²⁵ dan dapat pula memuat ancaman pidana atau denda lain, sesuai yang di atur didalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Rancangan perda yang telah ditujui oleh pemimpin DPRD kepada Gubernur, Bupati/walikota paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Apabila rancangan perda yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu paling lama 30 hari, perda tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib di undangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah. Pengesahan perda harus merumuskan dengan kalimat pengesahan yang berbunyi “Perda ini dinyatakan sah”, dengan mencamtumkan tanggal sahnya dan kalimat pengesahan itu harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah, sebelumnya mengundangkan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.

Sebagai upaya pengawasan terhadap peraturan daerah oleh pemerintah paling lama tujuh hari setelah ditetapkan, peraturan daerah tersebut harus disampaikan kepada pemerintah, peraturan daerah yang dinyatakan bertetangan dengan kepentingan umum, dan /atau peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah.²⁶

Cara mengirim peraturan-peraturan untuk meminta pengesahan, sudah tentu sangat tergantung dari apa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pengesahan itu untuk dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya, apakah peraturan

²⁵Republik Indonesia Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Pasal 15.

²⁶Siswanto Sunarsono, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 37-38.

dapat disahkan atau tidak, yang harus dikeluarkan oleh daerah yang bersangkutan kepada pejabat tersebut, ialah:

- 1) Beberapa Lembar (Biasanya 5) peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh DPRD.
- 2) Rancangan peraturan daerah tersebut, yang diajukan oleh kepala daerah oleh kepala DPRD
- 3) Penjelasan kepala daerah tersebut;
- 4) Jika penjelasan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c tidak ada, dan penjelasan umum dari peraturan daerah tersebut dimuat dalam surat pengantar dalam rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada DPRD. Maka salinan dari surat pengantar itulah yang dipergunakan sebagai pengganti penjelasan tersebut.

Petikan dari notulen rapat DPRD yang membicarakan dan menetapkan peraturan daerah tersebut.²⁷

b. Kewenangan Pengesahan Peraturan Daerah

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah mengenai pokok tertentu baru berlaku sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang yaitu:

- 1) Menteri Dalam Negeri bagi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah Tingkat I.
- 2) Gubernur Kepala Daerah bagi peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II.²⁸

²⁷Irwan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah* (Jakarta: PT Bina Akasara, 1983), h. 34.

²⁸Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah Di Daerah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h. 119.

C. Konsep Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* perlindungan merupakan tempat berlindung, hal (pembuatan dan sebagainya) melindungi. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak lainnya. Jadi pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkan sehingga muncul teori perlindungan hukum ini adalah perlindungan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparaturnegara.

Dengan begitu perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara baik individu maupun kelompok dalam masyarakat dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat indonesia sebagai negara hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁹

kepentingan hukum ialah mengurus dan melindungi hak kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan harus dilihat dari tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala ketentuan hukum segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap memiliki kepentingan masyarakat.

Kepentingan kepentingan tersebut -golongkan dengan maksud jika terjadi perselisihan kepentingan dalam proses pembangunan khusus benturan kepentingan umum atau sosial dan kepentingan individu, maka perlu di upayakan untuk menciptakan sebuah keseragaman kepentingan melalui penggunaan kekuasaan.

Dalam kepentingan pertentangan ini mengandung adanya kepentingan korban sebagai konsekuensi pembangunan usaha supaya hukum melakukan fungsinya. Seorang ahli hukum *Roscoe Pound* menggolongkan daftar kepentingan sebagai berikut:

²⁹Sujibto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

1. Kepentingan Kepentingan Umum (*Publik Interst*).
2. Kepentingan Sosial (*Sosial Interst*).
3. Kepentingan Kepentingan Individu (*Individu Interst*)

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh beberapa ahli seperti setiono yang mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum pemberdayaan masyarakat merupakan strategi besar dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (*People based develoment*).³⁰

Konsep pemberdayaan dapat dilihat dari sebagai akibat dan reaksi terhadap alam pemikiran tata masyarakat dan budaya yang berkembang dalam sebuah masyarakat.³¹ Pada awal kehadirannya konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.

Proses pemberdayaan dengan demikian merupakan *depowerment* dari sistem kekuasaan yang bersifat absolut. Konsep pemberdayaan mengartikannya dengan sistem yang baru, yang memberikan perhatian penting pada gagasan manusia dan kemanusiaan.

D. Gambaran Umum tentang Pasar

1. Pengertian Pasar

Pengertian pasar dapat dilihat dari arti sempit maupun luas. Secara sempit pasar adalah bertemunya penjual dan pembeli atau para produsen dan pembeli atau konsumen pada suatu lokasi tertentu. Secara arti luas bertemunya konsumen dan produsen merupakan sumber informasi bagi pelaku ekonomi serta juga merupakan sarana dalam meningkatkan sarana produsen dan konsumen.³²

Pasar adalah bertemunya kurva antara permintaan dan penawaran suatu pasar yaitu dimana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Jenis barang

³⁰Adimeihardja, K. & Hikmat H (2001). *Participatory research appraisals dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat: modul latihan*. Humaniora utama Press (HUP), h. 1.

³¹Hikmat, H. (2001), *Strategis pemberdayaan masyarakat*. Humaniora masyarakat Press. Hal. 1-2.

³²Henry Faizal, *Ekonomi Manajerial* (Jakarta: Raja Grafindo persada 2007), h. 104.

atau jasa yang ditransaksikan dapat berupa barang atau jasa angkutan uang atau tenaga kerja.³³

Dalam pasar terdapat pembagian pasar dengan membebagi beberapa pasar sesuai dengan fungsi dan kategori pasar.

2. Jenis-Jenis Pasar

a. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli, pasar terdapat di dalamnya terdapat tiga unsur, yaitu penjual, pembeli, dan barang atau jasa yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan, pertemuan antara penjual dan pembeli menimbulkan transaksi jual beli. Pasar menjadi memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat indonesia selain sebagai muara dari produk produk rakyat, pasar juga berfungsi sebagai tempat untuk bekerja yang sangat berarti untuk masyarakat.

Dengan kata lain pasar tradisional merupakan pilar penyangga perekonomian masyarakat kecil. Kedua, pasar tradisional merupakan tempat yang relatif lebih bisa dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas dari sisi jumlah.

Pasar tradisional jelas jauh lebih bisa diakses oleh sebagian besar pedagang terutama yang bermodal kecil dari pada pasar modern. Ketiga, pasar tradisional merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah lewat retribusi yang ditarik dari para pedagang tradisional. Keempat, akumulasi aktivitas jual beli di pasar tradisional merupakan faktor penting dalam penghitungan tingkat pertumbuhan ekonomi baik pada skala lokal, regional maupun nasional.

Pasar tradisional bersifat tradisional dan dapat melakukan mekanisme tawar menawar secara langsung berdasarkan peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tentang pembangunan, penataan dan pembinaan pasar tradisional adapun syarat-syarat pasar tradisional sebagai berikut:

- 1) Aklebitasi adalah kemungkinan pencapaian dari kawasan dan kawasan dalam kenyataan ini yang berwujud jalan dan transportasi atau peraturan lalu lintas.

³³Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (yogyakarta: BFEF, 2002), h. 43.

- 2) Kompabilitas yaitu keserasiandan keterpaduan antara kawasan yang menjadi lingkungan sekitarnya.
- 3) Flekibilitasnya yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik atau pemekaran kawasan pasar dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana.
- 4) Ekologis yaitu keterpaduan antara tatanam alam yang mewadahnya.

Dalam peraturan Presiden Republik Indonesia tersebut menjelaskan pula bahwa lokasi pendirian pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Meperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan toko modern serta usaha kecil termasuk koperasi yang ada di wilayah bersangkutan
- 2) Menyediakan area parkir paling sedikit seluruh kebutuha

b. Pasar Modern

Pasar Modern menggunakan prinsip swalayan atau pengambilan barang sendiri. Berbeda dengan pasar tradisional yang dilayani langsung oleh pedagang sehingga ada aktifitas tawar menawarkan barang yang tidak ditemui di pasar modern.

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Majene dalam Perda No 19 Tahun 2015, Pasar Modern (Toko Swalayan), adalah Toko atau Pasar dengan sistem pelayanan mandiri menjual berabagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Hypermarket, atau grosir yang berbentuk perkulakan. Pendiran Pasar Modern di kabupaten majene diatur dalam peraturan daerah no 19 tahun 2015 pasal 12,13 dan 14 yang berbunyi:

Pasal 12

- (1) Lokasi pendirian toko swalayan wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Toko Swalayan dapat berada di satu lokasi dengan Pasar Rakyat.
- (3) Toko Swalayan yang berada satu lokasi dengan Pasar Rakyat harus dikelola berdasarkan konsep kemitraan.

(4) Lokasi pendirian Toko Swalayan ditentukan sebagai berikut:

- a. Perkulakan hanya dapat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder;
- b. Pusat perbelanjaan dan hypermarket:
 1. Hanya dapat berlokasi pada akses jaringan jalan arteri atau kolektor;
 2. Dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan di dalam kota/perkotaan
 3. Pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan.
- c. Supermarket dan Departemen Store:
 1. Dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 2. Dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- d. Minimarket dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan dengan syarat dalam satu lingkungan pemukiman, paling banyak 2 (dua) minimarket dengan jarak paling dekat 5 (lima) Kilometer.

(5) Pendirian baru toko swalayan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu

10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 13

(1) Pendirian Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;

- b. Menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- c. Menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang saling menguntungkan;
- d. Menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan, dan
- e. Menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko swalayan.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Toko Swalayan harus:

- a. memperhatikan jarak dengan pasar rakyat dan antara toko swalayan dengan toko swalayan lainnya;
- b. ketentuan tentang jarak antara pasar rakyat dan antara toko swalayan dengan toko swalayan lainnya diatur paling dekat 5 (lima) Kilometer;
- c. memenuhi syarat pendirian bangunan terutama berkaitan dengan lingkungan hidup.

(3) Syarat pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembangunan harus di dahului dengan studi mengenai dampak lingkungan;
- b. Dokumen rencana rincian teknis harus mengacu pada ketentuan intensitas bangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang wilayah;
- c. Mempunyai izin gangguan; dan
- d. Selama proses pembangunan tidak menimbulkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sekitar.

Pasal 14

Batasan luas lantai penjualan toko swalayan ditentukan sebagai berikut:

- a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
- b. Supermarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter per segi);
- c. Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi); dan
- e. Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).³⁴

Minimarket dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam pengertian toko modern pengertian toko Modern di atur dalam peraturan presiden No 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan toko modern, dan toko modern adalah toko perbelanjaan dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara ceran yang berbentuk perkulakan setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada (pasal 4 ayat(1) peraturan presiden nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan, dan Toko Modern.

Agar tidak terjadinya kesalahan dalam jam operasional pasar modern di kabupaten majene, maka pemerintah membatasi jam operasional pasar modern yang diatur dalam perda no 19 tahun 2015 Pasal 33:

- (1) Waktu pelayanan atau jam kerja pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 (sepuluh) waktu Indonesia Tengah (WITA) sampai dengan pukul 22.00 WITA;
- b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 (sepuluh) waktu Indonesia Tengah (WITA) sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WITA.

- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional, atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan waktu pelayanan/jam kerja melampaui pukul 22.00 (dua puluh dua) WITA.

Saat ini pasar dikenal dengan adanya pasar tradisional dan pasar modern. Keberadaan pasar tradisional sangat besar manfaatnya bagi sebagian masyarakat indonesia dalam menciptakan tatanam dalam menciptakan kesejahteraan. Dalam

³⁴Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perlindungan, pemberdayaan pasar Tradisional dan Pasar Modern Pasal 12 13 dan `14.

menciptakan keselarasan antara pasar tradisional dan pasar modern dalam menciptakan segala bentuk tentang ketentuan pasar. Jika kita lihat dalam ketetapan pemberlakuan peraturan daerah untuk sebagai mana di berlakukannya untuk mencapai tujuan keserasian. pasar tradisional yaitu pertama pasar tradisional merupakan tempat dimana masyarakat berbagai lapisan memperoleh barang-barang kebutuhan harian dengan harga yang relatif terjangkau, karena memang sering kali relatif lebih murah dibandingkan harga yang ditawarkan pasar modern

E. Pasar Dalam Perspektif Islam

Setiap aktivitas pasti didalamnya mengandung tujuan. Begitupun sebuah syariah. *Maqashid syariah* bila diartikan secara bahasa adalah tujuan syariah. Tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Tujuan ini disepakati para ulama karena pada dasarnya tidak ada satupun ketentuan dalam syari'ah yang tidak bertujuan untuk melindungi mashlahah. Terlebih syariah sangat mendorong untuk terciptanya maslahah dalam dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Sehingga substansi dari *maqashid syariah* sendiri adalah maslahah.

Dalam dunia pasar tujuan yang ingin dicapai adalah kemaslahatan agar tidak adanya ketimpangan yang mengakibatkan kerugian bagi pedagang ataupun pembeli. Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin. Bahkan, Muhammad SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaurrasyidin dan kebanyakan sahabat. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan terror yang berat dari masyarakat kafir Makkah sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Ketika masyarakat Muslim telah berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah SAW bergeser menjadi pengawas pasar atau Al- muhtasib.

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Dalam suatu Hadits dijelaskan bahwa pasar merupakan hukum alam (Sunnatullah) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah SWT.

Untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar, secara sempurna, peran pemerintah sangat penting. Islam mengatur dalam mengawasi pasar secara ketat

salah satu yang di bentuk pada masa pemerintahan Rasulullah adalah pasar *al hisbah* merupakan sistem untuk memerintahkan yang adil dan baik jika kebaikan dan keadilan ketika hal tersebut dilakukan pada masa itu. Dalam lembaga ini juga melarang kemungkaran dan ketidakadilan ketika dalam menjalankan, cikal bakal *al hisbah* telah ada pada masa Rasulullah SAW.

Al hisbah merupakan lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan dalam menebar virus kebaikan dalam melarang melakukan hal kebusukan yang terjadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan dan menjadi kebiasaan umum dan menjadi sebuah budaya dalam lembaga *Al hisbah*, pada masa Rasulullah menjadi hal yang sangat penting dalam pengawasan pasar yang sering dilakukan pada masanya dan menjadi sebuah percontohan dalam berbisnis dan melarang saat berdagang untuk melakukan kecurangan.

Pada setiap perekonomian, pasar memegang peran penting termasuk dalam perekonomian masyarakat muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar sahabat pada usia tujuh tahun Rasulullah SAW diajak pamannya Abu Thalib melakukan perjalanan perdagangan ke negeri syam, dan dari sinilah ilmu perniagaan beliau dapat. Sejalan dengan usia beliau semakin dewasa Rasul semakin giat berdagang. Setelah sudah menjadi suami Khadijah pun, beliau tetap aktif berbisnis termasuk berdagang di pasar-pasar lokal di kota makkah.

Rasulullah saw adalah seorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Adapun dalam firman Allah swt menjelaskan pada QS al-Baqarah /2:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَائِعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.³⁵

Kondisi para pemakan riba yang berjalan tidak normal yang disebabkan mereka tetap kukuh pendirian bahwa jual beli (yang dikatakan) itu semua sama dengan riba padahal Allah tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.³⁶

Islam mengatur persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang seperti :

- a. Talaqqi rukban dilarang karna pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota.
- b. Mengurangi timbangan dilarang karna barang yang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.
- c. Menyembunyikan barang yang cacat dilarang karna penjual mendapatkan harga yang baik kualitas yang buruk.
- d. Transaksi *najazy* dilarang karna si penjual menyuruh untuk memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-hadi Media Kreasi. 2014), h. 47.

³⁶ Muhammad amin suma, *Tafsir Ayat Ekonomi: teks terjemahan dan tafsir* (Jakarta: Amsah, 2015),h.174.

e. Iktikar dilarang yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang harga yang lebih tinggi.

f. *Ghaban faa-hisy* (besar) dilarang yaitu di atas harga pasar.³⁷

Pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsi secara fisik, tetapi juga aturan, norma yang terkait dengan masalah pasar. Pasar menjadi rentan dengan jumlah kecurangan dan perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain terkait dengan pembentukan harga yang terjadi di pasar.³⁸

Dalam Islam transaksi terjadi sukarela sebagaimana dijelaskan pada firman Allah swt dalam QS an-Nisa/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩



Terjemahnya:

³⁷ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Press, 2012),h.153.

³⁸ Sukarno Wibowo dan dedi supriadi,*Ekonomi Mikro Islam*(Bandung: Pustaka Setia,2013),.h. 201.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁹

Pada dasarnya larangan (mengharamkan) orang-orang yang beriman dari kemungkinan melakukan usaha ekonomi kemudian memakan dan menikmati hasilnya dengan cara-cara yang batil adapun cara yang memakan (*Taktulu*) dalam ayat ini mengambil dengan cara memperoleh sedangkan diantara kamu (*Bainakum*) ini mengiat harta kekayaan yang diharamkan itu pada umumnya diperoleh melalui pratan transaksi ekonomi yang sudah tentu melibatkan para pihak dalam hal ini pemakan dengan yang dimakan yang diperoleh melalui transaksi para pihak itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan cara-cara batil adalah cara usaha ekonomi yang diharamkan agama, misalnya praktek ribawi, perjudian, penipuan dan lain-lain. Al-Qur'an hanya memperbolehkan orang-orang beriman untuk melakukan usaha ekonomi dengan cara halal saja. Terutam bentuk usaha ekonomi yang dilakukan atas dasar saling rela antara pihak yang melakukan transaksi jual beli yang dihalalkan oleh Allah swt.

Ekonomi Islam memandang bahwa Pasar adalah Negara, individu berada dalam keseimbangan pasar dijamin kebebasan dalam islam. Pasar bebas menentukan dengan cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi pasar yang berjalan secara adil kenyataan sulit ditemukan. Distorsi pasar sering terjadi sehingga dapat merugikan para pihak.⁴⁰ Pandangan Islam mengenai pasar mengajurkan sekiranya seluruh pelaku usaha pasar bertindak secara adil sejak dari diri sendiri. Salah satu upaya dengan berbenahi dan menacari solusi agar mampu berekonomi dengan adil agar sesuai dengan ajaran syariat Islam.

1. Mekanisme Pasar dalam Islam.

Penghargaan Islam terhadap mekanisme Pasar berdasarkan ketentuan Allah swt bahwa perniagaan harus dilaksanakan dengan baik dengan rasa suka sama suka. Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan *mutual good will* bagi para pelakunya, nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus, nilai moralitas yang terdapat menjadi perhatian penting dalam pasar adalah persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, dan

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-hadi Media Kreasi. 2014), h. 83.

⁴⁰Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 203.

keadilan. Nilai-nilai moralitas ini sangat penting serta akar yang kuat dalam ajaran Islam untuk itu Rasulullah saw telah menetapkan beberapa larangan terhadap praktik bisnis negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar islam.

Konsep mekanisme pasar dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

Ar-Ridha yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*Freedom contact*):

- a. Berdasarkan persaingan sehat (*Fair Competition*). Mekanisme pasar akan terlambat bekerja jika tidak ada penimbunan (*Ihtikar*) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- b. Kejujuran (*Honesty*). Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab dalam nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam pandangan dan masyarakat luas.
- c. Ketebukaan(*Tranparency*) serta keadilan (*Justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah teransaksi yang dilakukan bertuntut untuk melakukan hal yang benar dalam pengungkapan serta kehendak yang sesungguhnya.⁴¹

⁴¹Suud Fuadi “*Mekanisme Pasar Islami dan pengadaan harga*” di akses pada tanggal (4 april 2018).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang belum diketahui.

Peneliti berupaya mengamati berbagai objek terkait dengan subjek studinya semenjak ia mencatat data di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan berada di Kabupaten Majene. Lebih tepatnya pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di Jl. Ammana wewang No.12 Kabupaten Majene

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan Yuridis formal dan yuridis empiris.

1. Yuridis Formal

Yuridis formal adalah dasar hukum resmi baik terdapat dalam pancasila, UUD 1945, KHUP dan KUHAP, ataupun produk perundang-undangan lainnya. Juga menggunakan 2 pendekatan dalam hal ini pendekatan yang diambil melalui hukum Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

2. Yuridis Empiris

Yuridis empiris adalah menganalisis permasalahan dilakukan dengan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data ini didapatkan melalui *field researd*, penelitian langsung dengan melihat di lapangan dengan cara interview. Dengan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara (Tanya jawab) pada pemerintah setempat yang

bersangkutan melalui informan yaitu aparat pemerintah, masyarakat dan pedagang.

2. Data Sekunder

Suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta jurnal yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern dan pandangan hukum Islam.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Observasi,

Metode Observasi atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.⁴²

2. Wawancara atau Interview

Wawancara atau Interview adalah pertemuan antara dua orang atau percakapan dua orang untuk mendapatkan informasi melalui pertanyaan, dimana ada yang bertindak sebagai informan dan ada yang bertindak sebagai pewawancara antara lain peneliti, aparat pemerintah, masyarakat dan pedagang.

3. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu suatu peraturan undang-undang dalam masyarakat, serta berbagai bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian ini tentang pelaksanaan Perda No. 19 tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern di Kota Majene.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dan informan yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dokumentasi monumental dari seseorang.

⁴² Hady Sutrisno, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri karena peneliti lebih kenal maksud dan tujuan penelitian ini dengan menggunakan.

1. Peneliti

Peneliti adalah orang yang melakukan suatu penelitian dalam hal ini adalah peneliti.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini digunakan untuk menggunakan wawancara untuk dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan agar proses wawancara lebih terarah dan tidak terjadi kekeliruan.

3. Buku dan Alat tulis

Digunakan untuk mencatat semua percakapan yang didapatkan dari sumber wawancara.

4. Kamera

Digunakan untuk memotret proses penelitian dalam melakukan wawancara dan berbagai kegiatan yang dianggap penting.

5. Tape Recorder/Handphone (HP)

Digunakan untuk merekam semua proses wawancara dengan informan. karena jangan sampai data yang dicatat kurang akurat maka hasil rekaman dapat digunakan untuk menyempurnakannya.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Suyanto dan Sutinah mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklarifikasikan dan mengkategorikan data dengan berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dimana langkah-langkah yang dilakukan untuk menajamkan analisis, menggolongkan dalam setiap permasalahan melalui uraian singkat, megarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasikan. Kemudian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah penelitian melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan suatu langkah penting menuju tercapainya suatu penelitian kualitatif yang valid dan handal.

c. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Tahap ini adalah tahap penarikan kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari dan memahami makna/arti, keteraturan pola-pola penjelasan alur sebab akibat atau proposi. Dimana sebelum penarikan kesimpulan dilakukan cara reduksi data dan penyajian data selanjutnya penarikan kesimpulan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

2. Analisis data

Analisis data adalah proses pengelolaan data dalam bentuk yang sederhana supaya dapat dimengerti, dipahami serta di interpretasikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif. Kualitatif adalah menganalisis data-data atau menggambarkan data hasil penelitian di lapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka-angka dan selanjutnya pengolahan data disajikan secara deskriptif analisis dengan menggambarkan secara lengkap mengenai masalah-masalah berdasarkan penelitian lapangan.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN MAJENE NOMOR 19 TAHUN 2015 DALAM IZIN PENDIRIAN DAN PENATAAN TATA LETAK SWALAYAN DI KABUPATEN MAJENE PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Majene

a. Letak Geografis

Kabupaten Majene terletak antara 2° 38' 45" – 3° 38' 15" Lintang Selatan dan antara 118° 45' 00"-119° 4' 45" Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kabupaten Mamuju di sebelah utara dan Kabupaten Polewali Mamasa sebelah timur, sedangkan sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Teluk Mamasa dan Selat Makassar. Kabupaten Majene adalah salah satu dari 5 kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Barat memanjang dari selatan ke utara kurang lebih sepanjang 146 km dari Kabupaten Mamuju (Ibukota Provinsi Sulawesi Barat).

b. Administratif

Kabupaten Majene terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 82 (delapan puluh dua) desa/kelurahan, yakni Kecamatan Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammeroddo Sendana, Tubo Sendana, Malunda, dan Ulumanda.

Kabupaten Majene termasuk daerah yang memiliki banyak sungai-sungai kecil yang tersebar di seluruh kecamatannya yakni sekitar 85 (delapan puluh lima) sungai. Sungai-sungai inilah yang menjadi sumber air bagi masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya. Pada saat ini air baku yang digunakan adalah air permukaan/sungai, berasal dari Sungai Abaga, Sungai Mangge dan Sungai

Tinambung untuk BNA dan untuk IKK adalah Sungai Belia, Sungai Karaka, Sungai Mangarabombang, Sungai Malunda dan Sungai Tammeroddo.

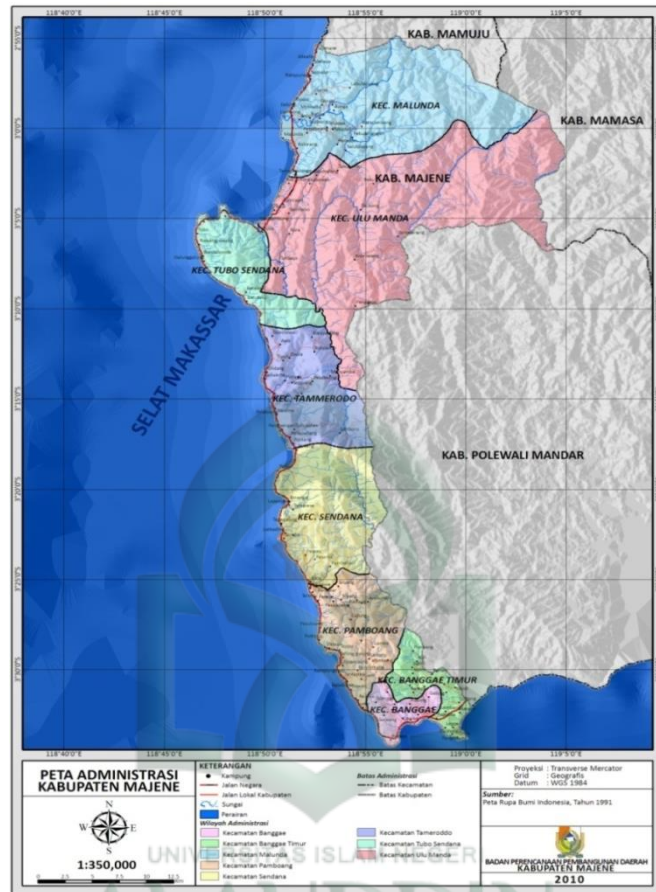
Di mana untuk intake Sungai Abaga yang berkapasitas 40 lt/dt mengalami penurunan debit air menjadi rata-rata 15 lt/dt pada saat musim kemarau. Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Wilayah Kabupaten Majene dapat dilihat pada Tabel 2.1 di halaman Lampiran.

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA	LUAS WILAYAH	
			KM2	(%) THD TO TAL
1.	Kec. Banggae	8	25,15	2,653
2.	Kec. Banggae Timur	9	30,04	3,169
3.	Kec. Pamboang	15	70,19	7,405
4.	Kec. Sendana	16	82,24	8,677
5.	Kec. Tammeroddo Sendana	7	55,40	5,845
6.	Kec. Tubo Sendana	7	41,17	4,344
7.	Kec. Malunda	12	187,65	19,798
8.	Kec. Ulumanda	8	456,00	48,109
Jumlah		82	947,84	100

Sumber: Majene dalam angka 2011

Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947,84 Km² dengan ibukota kabupaten terletak di Kecamatan Banggae dengan luas perkotaan 5.515 km, yang berada di posisi selatan Kabupaten Majene, dengan waktu tempuh sekitar 3 jam sampai 4 jam dari Ibukota Sulawesi Barat (Mandar Raya) yaitu ±120 Km. Dari total luas wilayah Kabupaten Majene, Kecamatan Ulumanda merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni 456,00 Km², kemudian Kecamatan Malunda dengan luas 187,65 Km². Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yakni Kecamatan Banggae dengan luas wilayah 25,15 Km². Luas wilayah per kecamatan serta jumlah kelurahan yang ada di Kabupaten Majene dapat dilihat pada Tabel 1. berikut

Adapun peta administrasi dan cakupan wilayah kajian Kabupaten Majene sebagai berikut:



c. Kondisi Fisik

Dari aspek topografi, Kabupaten Majene memiliki wilayah yang kondisinya relatif bervariasi, yakni, pada sisi selatan merupakan daerah pesisir yang relatif datar sedangkan pada sisi utara merupakan daerah pegunungan. Berdasarkan data statistik tahun 2008 luas wilayah yang memiliki kemiringan 0-10% adalah 125,72 Km², sedangkan sisanya memiliki kemiringan lebih besar dari 10%.

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Majene dan sekitarnya secara umum ditandai dengan hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi dan sangat dipengaruhi oleh angin musim, hal ini dikarenakan wilayahnya berbatasan dengan

laut lepas (Selat Makassar dan Teluk Mandar). Berdasarkan catatan Stasiun Meteorologi, rata-rata temperatur di Kabupaten Majene dan sekitarnya sepanjang tahun 2010 berkisar $27,13^{\circ}\text{C}$, dengan suhu minimum $22,53^{\circ}\text{C}$ dan suhu maksimum $30,83^{\circ}\text{C}$. Curah hujan di Kabupaten Majene tertinggi pada Bulan September sebesar $303,1\text{ mm}^3$ dengan hari hujan 25. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Maret sebesar $84,9\text{ mm}^3$ dengan jumlah hari hujan 17.

Sementara sepanjang tahun 2011 rata-rata temperatur di Kabupaten Majene dan sekitarnya berkisar $27,52^{\circ}\text{C}$, dengan suhu minimum $22,83^{\circ}\text{C}$ dan suhu maksimum $32,93^{\circ}\text{C}$. Curah hujan di Kabupaten Majene tertinggi pada Bulan Desember sebesar $456,4\text{ mm}$ dengan jumlah hari hujan 26. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar $1,6\text{ mm}$ dengan jumlah hari hujan 5.

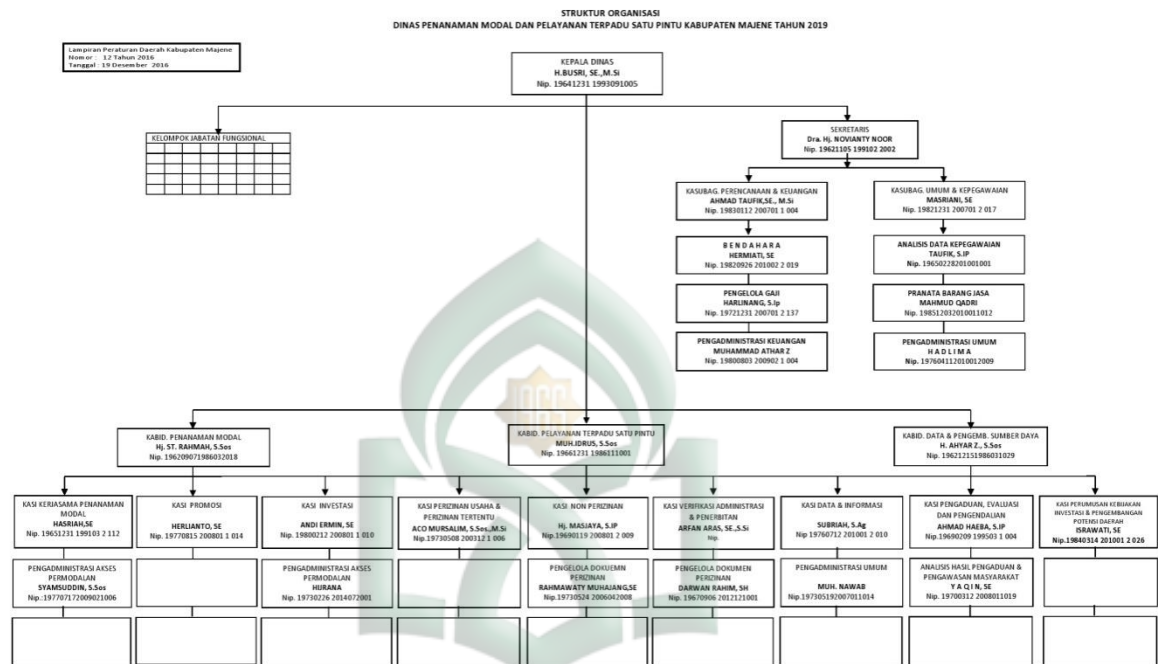
d. Demografi

Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Majene sementara adalah 151.107 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 73.673 jiwa atau 48,76 % dan penduduk perempuan sebesar 77.473 jiwa atau 51,24 %. Dari hasil sensus tersebut tampak bahwa penyebaran penduduk kabupaten Majene masih bertumpu di Kecamatan Banggae yakni sebesar 24,71 persen atau 37.333 jiwa kemudian diikuti Kecamatan Banggae Timur sebesar 18,89 persen atau 28.550 jiwa sedangkan kecamatan lainnya berkisar antara 5 persen sampai 14 persen dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Tubo yang berpenduduk sebesar 8.214 jiwa.

Dengan luas wilayah Kabupaten Majene $947,84\text{ Km}^2$ dan didiami sebanyak 151.107 jiwa, maka tingkat kepadatan rata-rata penduduk Kabupaten Majene adalah 160 jiwa per Km^2 , dengan tingkat kepadatan tertinggi berada di wilayah Kecamatan Banggae yaitu 1.485 jiwa per Km^2 dan terendah adalah Kecamatan Ulumanda yaitu Kecamatan Ulumanda sebanyak 19 jiwa per Km^2 ,

dimana laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yaitu antara tahun 2000 sampai tahun 2010 adalah sebesar 1,97%.

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)



DPMPTSP Kabuapten majene terletak pada Jl. Ammana Wewang No. 12 Majene terletak di samping terminal Kota. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan dinas yang bertugas membantu melaksanakan urusan pemerintah di bidang modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepala Daerah.

Visi

Terwujudnya iklim investasi dengan pelayanan prima menuju *good governance*

Misi

1. Tumbuh dan berkembang iklim investasi
2. Mengebangkan dan menerapkan teknologi informasi dan sistem pelayanan
3. Meningkatkan profesionalisme pelayanan perizinan dan non perizinan'

4. Berpartisipasi dalam pelayanan monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan

Adapun Fungsi dari DPMPTSP sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- b. Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data dan informasi;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

B. Pelaksanaan Penerapan izin pendirian Toko swalayan di Kabupaten Majene.

Toko swalayan adalah toko dengan system pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Dalam pelaksanaan pendirian toko swalayan meliputi:⁴³

1. Lokasi pendirian toko swalayan wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah, termasuk peraturan zonasinya.
2. Toko swalayan dapat berada di datu lokasi dengan pasar rakyat
3. Toko swalayan yang berada satu lokasi dengan pasar Rakyat harus dikelolah berdasarkan konsep kemitraan.
4. Lokasi pendirian toko swalayan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Perkulakan hanya dapat berlokasi pada akses system jaringan jalan arteri a tau kolektor primer atau arteri sekunder;
 - b. Pusat pemebelajaan dan hypermarket:
 - 1) Hanya berlokasi pada akses jaringan jalan arteri atau kolektor.
 - 2) Dilarang berlokasi pada system jaringan jalan lingkungan di dalam Kota/perkotaan; dan
 - 3) Pendiannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuha baru bagi daerah yang bersangkutan.
 - c. Supermarket dan departemen store:
 - 1) Dilarang berlokasi pada system jaringan jalan lingkungan; dan
 - 2) Dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.

⁴³Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kabupaten Majene.

d. Minimarket dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk system jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan dengan syarat dalam satu lingkungan pemukiman, paling banyak 2 (dua) minimarket dengan jarak paling dekat 5 kilometer.

5. Pendirian baru toko swalayan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

Adapun berkas data persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalam izin Toko Pendirian Toko Swalayan Kabupaten Majene, adapun data yang harus dilengkapi dalam syarat pendirian toko swalayan sebagai berikut:

SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Persyaratan pelayanan

1. Permohonan
2. Foto copy/Pendirian, perseorangan
3. Foto copy akte perubahan pendirian perseorangan bila ada
4. Foto Copy surat keputusan Pengesahan Badan Hukum dan Ham
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penanggung jawab dan atau Direktur Utama Perusahaan
6. Foto Copy Neraca Perusahaan
7. Foto Copy IUKJ (bergerak Jasa Konstruksi)
8. Foto Copy NPWP
9. Foto Copy SITU
10. Rekomendasi dari Dinas Terkait
11. Pas Foto 3x4 cm Sebanyak 4 (lembar)
12. Materai 6000 sebanyak 2 lembar

SIUP PERDAGANG BARU

Perusahaan yang berbentuk CV atau FIRMA

1. Permohonan
2. Foto copy/Pendirian,perseorangan
3. Foto copy akte perubahan pendirian perseorangan bila ada
4. Foto Copy surat keputusan Pengesahan Badan Hukum dan Ham
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penanggung jawab dan atau Direktur Utama Perusahaan
6. Foto Copy Neraca Perusahaan
7. Foto Copy IUJK(bergerak Jasa Kontuksi)
8. Foto Copy NPWP
9. Foto Copy SITU
10. Rekomendasi dari Dinas Terkait
11. Pas Foto 3x4 cm Sebanyak 4 (lembar)
12. Materai 6000 sebanyak 2 lembar

Seperti halnya yang dijelaskan oleh ibu Subriah, S.Ag. (kasi Data dan Informasi mengatakan bahwa:

Setiap orang yang ingin mendirikan usaha Harus menyertakan data yang sudah menjadi prosedur ketika ingin mendirikan Pasar swalayan untuk izin pendirian dari pemerintah daerah agar dapat meperoleh izin usaha dalam kategori Toko Swalayan.⁴⁴

Seperti halnya yang dijelaskan oleh ibu Subriah, S.Ag. (kasi Data dan Informasi mengatakan bahwa:

Adapun data yang dimiliki oleh dinas Penanaman Modal satu pintu (PTSP) sebagai berikut:

⁴⁴Subriah S. Ag. *Kasi data dan informasi Dinas Penanaman Modal Satu Pintu*, di Kantor DPMSP Majene pada 16 Juni 2019.

No	Nama Usaha	Alamat Usaha
1	PT Midi Utama Indonesia Tbk	Jl.Jend Sudirman Kecamatan Baggae Timur
2	PT Indomarco Prismatama	Sombatimur Kecamatan Sendana
3	PT Indomarco Prismatama	Jlnporos Lingkungan Galung-Galung Kecamatan Pamboang
4	CV Sumber Hidup Mandiri	Jl.Poros Lingkungan Sasende Kecamatan Malunda
5	CV Sumber Hidup (Indomaret)	Jl.Poros Lngkungan Lingkkungan Rangs Kecamatan Banggae
6	PT Indomarco Primatama	Jln Gatot Subroto Pa'leo Kecamatan Banggae
7	Toko Sulawesi	Jl Jenderal Sudirman Binanga Kecamatan Banggae Timur

Berdasarkan data yang diperoleh adalah data yang dimiliki oleh kantor dinas penanaman modal satu pintu (DPM-PTSP). Namun dalam penelitian lapangan ditemukan lokasi pendirian toko swalayan tak sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dalam hal ini supermarket yang didirikan hanya berjarak kurang lebih 500 meter dari supermarket yang satu ke supermarket berikutnya. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas peraturan daerah yang berlaku.

Toko swalayan hanya dapat beraktifitas ataupun berdiri apabila telah memperoleh izin pendirian toko swalayan yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Sebagai mana yang telah tertuang dalam pasal 15 Perda Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2015 sebagai berikut:

1. Untuk melakukan usaha pasar rakyat dan toko swalayan wajib memiliki izin yang terdiri atas;
 - a. Izin usaha pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) untuk pasar rakyat;
 - b. Izin usaha pusat pembelanjaan (IUPP) untuk pertokoan mall, plaza, dan pusat perdagangan; dan
 - c. Izin usaha toko swalayan (IUTS) untuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket dan perkulakan.
2. Izin usaha toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan menengah setempat.

3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh bupati.
4. Permonhonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilengkapi;
 - a. Studi kelayakam social ekonomi;
 - b. Analisa mengenai dampak lingkungan dan social ekonomi;
 - c. Skema pola kemitraan dengan pelaku usaha kecil menengah, koperasi, dan pasar rakyat; dan
 - d. Surat izin usaha/peruntukan lahan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan bupati.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat 4 huruf a⁴⁵ bahwa permohonan izin pendirian toko swalayan harus memenuhi studi kelayakan sosial ekonomi, studi tersebut dimaksudkan agar tidak adanya tumpang tindih akibat berdirinya pasar swalayan dalam hal ini tidak adanya penurunan pendapatan pedagang kecil akibat adanya atau berdirinya toko swalayan tersebut.

Seperti halnya yang diungkapkan salah satu narasumber yang di wawancarai yaitu bapak Mujahir (40 Tahun) pedagang, menyatakan:

Sejak adanya pasar modern saat ini, pembeli yang datang ke kami mengalami penurunan, yang datang di pasar tradisional kenapa karna banyaknya masyarakat yang tak mau lagi ke pasar, ya mungkin kalau pasar agak kurang bersih, beda dengan Toko Modern.⁴⁶

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa keberadaan toko swalayan mengakibatkan ketimpangan bagi pedagang kecil, dan pemberian izin pendirian dengan syarat studi kelayakan tersebut tidak maksimal sebagaimana yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut.

⁴⁵Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2015 Pasal 15 Ayat 4 Huruf a Tentang Tentang Perlindungan , Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kabupaten Majene.

⁴⁶Muhajir *Pedagan Pasar Tradisional*, wawancara di Pasar Sentral Kabupaten Majene, 15 Juni 2019.

Dalam konteks kajian pasar terdapat dua wilayah konsep kajian pasar yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Dalam hal ini peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan pasar modern di Kabupaten Majene. Menjadi sebuah alasan dalam melirik efektifitas peraturan Daerah Kota Majene Nomor 19 tahun 2015 terhadap maraknya pendirian pasar modern.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber yang bernama Risman 35 Tahun

“Toko alfa midi dan indomaret itu bukanya 24 jam sedangkan saya memulai jualan pada sore hari, namun yang jadi masalah adalah mereka yang tidak membatasi jam buka-tutupnya serta jaranya begitu berdekatan sehingga peluang saya sebagai pedagang kaki lima sangat terbatas dikeranakan jarak mereka yang begitu dekat seharusnya pemerintah mengatur agar adanya keseimbangan bagi kami pedagang kaki lima⁴⁷

Dari hasil wawancara diatas ditarik sebuah kesimpulan bahwa selain dari pada maraknya pasar modern yang berjarak kurang lebih 500 meter tersebut pasar modern juga beroperasi selama 24 jam, sehingga hal tersebut mengakibatkan angka penurunan penghasilan bagi para pedagang di pasar tradisional. menunjukkan bahwa optimalisasi pemerintah dalam pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2015 tidak begitu maksimal, ditambah dengan beberapa masyarakat dalam hal ini adalah kaki lima (pk 5) dan pedagang pasar tradisional yang tidak mengetahui bahwa adanya pelanggaran yang lakukan oleh pasar modern (swalayan).

Dalam hal ini dari Dinas penanaman modal satu pintu harus lebih melihat dari aturan yang berlaku dan tidak serta merta mengeluarkan izin usaha untuk pendirian pasar modern, seharusnya pemerintah meninjau kembali aturan yang berlaku. Ketidak sesuaian antara Peraturan Daerah dengan realitas lapangan merupakan sebuah bentuk kurang efektifnya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun

⁴⁷ Risman *pedagang kaki lima wawancara di Kabupaten Majene*, 15 Juni 2019

2015 tentang pendirian pasar modern. Dan tidak menjalankan peraturan daerah tentang Pendirian pasar modern dalam hal ini toko swalayan yang berjarak kurang lebih 500 Meter dari yang satu ke yang lain dan mengenai batas jam operasional masing-masing toko swalayan .

C. *Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 dan Pengawasan dan Penataan Tata Letak Toko Swalayan di Kabupaten Majene.*

Dalam sebuah *plaining* atau sebuah tujuan dalam hal ini pelaksanaan peraturan daerah memungkinkan sebuah ketidak maksimalan dalam penerapannya karena disebabkan oleh factor penghambat sehingga efektifitas penerapan sebuah perda tidak maksimal dan ada pula yang maksimal dikarenakan penerapan perda tersebut berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 19 tahun 2019 kabaupaten Majene di temukan sebuah faktor pengahmbat sehingga perda tersebut tidak berjalan secara maksimal. Hal ini dijelaskan oleh salah satu narasumber yang bernama Harlianto, S.E.

“Faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 19 tahun 2015 tesebut karena kurangnya SDM yang melakukan pengawasan secara langsung atau dapat dikatakan kurangnya SDM yang diwilayah lapangan”.⁴⁸

SDM merupakan organ penting dalam sebuah kinerja baik pemerintahan ataupun swasta, dari hasil wawancara yang di lakukan dapat disimpulkan bahwa salah satu Faktor penghambat efektifnya perda tersebut karena kekurangan SDM diwilyah lapangan. Selain dari pada SDM ditemuka sebuah faktor yang lain sehingga menghambat keefektifitasan Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2015 tersebut.

⁴⁸Harlianto, S.E *kasi analisis hasil pengaduan dan pengawasan masyarakat*, wawancara di kantor dinas penanaman modal terpadu satu pintu Majene pada 16 Juni 2019.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pasar modern yang saling berdekatan sangat merugikan masyarakat sekitar sehingga tidak adanya ruang bagi masyarakat sekitar dan selain kekurangan SDM terdapat juga Faktor lain yaitu bentuk sosialisasi tentang perda nomor 19 tahun 2015 sehingga masih banyaknya masyarakat atau pedagang pasar yang belum tahu menahu tentang adanya peraturan daerah tersebut sehingga mengakibatkan kurang efektifnya peraturan daerah tersebut.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terhadap penertiban Peraturan Daerah Kota Majene Nomor 19 tahun 2015 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisional dan pasar modern Seperti yang terdapat pada pasal 15 ayat (1) s/d (5) harus mematuhi setiap aturan dan segala cara yang tertuang dalam perda tersebut.

Dalam hal ini pemerintah yang berwenang wajib mengerjakan segala bentuk pematuhan aturan tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam wilayah pertanian perikanan maupun pengawasan dan penataan toko swalayan yang berada di Kabupaten Majene.

Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang narasumber yang bernama Harlianto, S.E (kasi analisis hasil pengaduandan pengawasan masyarakat) mengatakan bahwa:

“Bentuk pengawasan kami itu sesuai dengan standar operasional kerja dinas pelayanan satu pintu tersebut dengan kata lain ketika ada pengaduan dari masyarakat itu sendiri barulah kami turun mengecek kebenaran dari aduan masyarakat tersebut, ada 3 proses pengawasan yang kami lakukan yang pertama jika ada laporan, melakukan monitoring, dan mengevaluasi”.⁴⁹

⁴⁹Harlianto, S.E *kasi analisis hasil pengaduandan pengawasan masyarakat*, wawancara di kantor dinas penanaman modal terpadu satu pintu Majene pada 16 Juni 2019.

Dalam pasal 25 Perda Kota Majene Nomor 19 Tahun 2015 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisioanal dan pasar modern bagian kedua yaitu pengawasan

1. Pemerintah daerah melakukan pengawsan terhadap pasar rakyat dan Toko swalayan.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Laporan
 - b. Monitoring
 - c. Evaluasi
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat tentang:
 - a. Upaya perlindungan terhadap pasar rakyat
 - b. Upaya pemberdayaan pasar rakyat, dan
 - c. Upaya penaataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan
5. Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap pelaksanaan perlindungan, pemberdayaan dan penataan, terutama kemitraan antara pasar rakyat dan toko swalayan

Sedangkan pada pasal 26 dijelaskan bahwa dalam rangka pengawasan, pemerintah daerah dapat meminta data dan/atau informasi penjualan kepada pengelola Toko swalayan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memeriksa kesesuaian isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan hasil monitoring.

Dalam perda kota Majene telah jelas dikemukakan perihal bentuk pengawasan terhadap toko swalayan dan penataan toko swalayan. Dalam rangka melakukan pengawasan melalui 3 cara yaitu pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Namun dalam penelitian lapangan pada saat mewawancarai salah satu narasumber yang bernama Nuraida 56 Tahun) mengatakan bahwa:

“Kami sebagai pedagang tak pernah tahu bahwa ada peraturan daerah yang mengatur tentang pasar dan pengawasan terhadap pasar, sehingga kami sebagai pedagang pasar tradisional tak tahu pelanggaran apa saja yang di langgar oleh toko swalayan dan kami tak tau hal yang baik kami lakukan ataupun toko toko besar itu berdiri”.⁵⁰

Dari hasil wawancara bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah yang berwewenang belum begitu maksimal dan terdapat banyaknya masyarakat ataupun pedagang yang tak mengetahui terhadap adanya peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang perlindungan pemberdayaan pasar tradisioanal dan pasar modern

Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu narasumber yang bernama Muh ilman .

Menjamurnya pasar modern di Kabupaten Majene tidak memperhatikan regulasi berdasarkan acuan Rencana Tata ruang wilayah, dan pemerintah juga serta merta melakukan pendirian pasar modern,namun pemerintah belum menindak lanjuti pelanggaran-pelanggaran atas tuntutan kami pada saat itu,seharusnya pemerintah kabupaten majene melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan daerah terhadap pasar modern yang saling berdekatan.⁵¹

Seperti yang terdapat pada salah satu *Minimarket* dan sejenisnya ditemukan ketidak sesuaian antara peraturan daerah dan kondisi yang ada di lapangan tata letak toko swalayan yang tak mematuhi peraturan daerah, salah satunya adalah jarak antara toko swalayan yang satu dengan yang lain sangat berdekatan kurang lebih 500 meter hal ini menunjukkan bahwa penataaan tata letak toko swalayan berbeda jauh dengan apa yang tertuang pada Pasal 12 ayat 4 huruf d⁵²

⁵⁰Nuraida *pedagang pasar* , wawancara di pasar tradisional Majene pada tanggal 15 Juni 2019.

⁵¹ Jumaing, *Masyarakat dan Pedagan Kaki lima*, Wawancara di Pasar Tradisional Majene pada tanggal 16 Juni 2019.

⁵²Lihat Peraturan Daerah Kota Majene Nomor 19 Tahun 2015

Seperti yang di ungkapkan salah satu narasumber pada saat diwawancarai yang bernama Aco Mursalim, S.Sos., M.Si. Kasi Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu.

“Kalau pengawasannya kita disini tetap dilakukan secara umum, sesuai dengan standar oprasionalnya disini dan sampai saat ini kita belum mendapatkan kesalahan kesalahan karena tidak ada juga aduan yang tersampaikan dan kita tidak mengawasi secara langsung dan walaupun ada aduan dan polemik di lapangan kami akan menindak lanjuti sembari mengkaji hal tersebut, dan jika benar ada masalah kami akan melakukan kordinasi dengan pihak DPRD untuk meninjau aturan-aturan yang berlaku”.⁵³

Dari hasil wawancara diatas ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemerintah yang berwenang melakukan monitoring terhadap pengawasan pasar dan toko swalayan akan tetapi kelemahan pemerintah setempat tidak memberikan pengertian atau dapat disebut mensosialisasikan tentang peraturan daerah tersebut, menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat atau yang berwenang. akan tetapi pengawasan yang dilakukan tidak begitu maksimal sehingga masih ditemukan adanya ketimpangan antara pedangan tokoh Swalayan selain itu perlunya korndinasi yang baik dari dinas DPM-PTSP dan beberapa instansi yang terkait, dalam hal ini dalam pelanggar izin pasar Modern di Kabupaten Majene agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan seharusnya juga pemerintah mengeluarkan kebijakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini pasar modern yang sesuai dengan peraturan bupati dengan memberikan sangsi adimistrasi Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa :

⁵³Aco Mursalim, S.sos., M.Si *Kasi Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu*. 15 Juni 2019.

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin usaha; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha;

(1). Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.⁵⁴

Hal ini merupakan faktor penghambat terhadap pelaksanaannya aturan mengenai penataan tata letak serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal mengenai pelaksanaannya serta masih banyak pasar modern yang melanggar dan kurangnya perhatian pemerintah sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku usaha pasar modern yang telah melanggar aturan tersebut.

Bentuk pelaksanaan efektifitas peraturan daerah nomor 19 tahun 2015 dan Bentuk pengawasan tersebut tidak begitu maksimal dikarenakan tidak adanya tim yang turun langsung mengawasi lokasi dan dampak yang ditimbulkan akibat ketidaksesuaian peraturan daerah, aturan yang berlaku serta kurang sosialisasi pejabat yang berwenang tentang adanya peraturan daerah tersebut sehingga mengakibatkan kurang paham atau tidak tahunya masyarakat peraturan daerah tersebut.

D. Pandangan Hukum Islam terhadap penataan pembangunan pasar Tradisional di Kota Majene

Setiap aktivitas pasti di dalamnya mengandung tujuan apapun aktivitas tersebut, begitu pula dengan hukum Islam atau kadang disebut dengan *Maqashid syariahyah* tujuan utama dari *Maqashid syariahyah* adalah merealisasi kemanfaatan untuk umat manusia baik urusan dunia maupun akhirat.

⁵⁴Peraturan Bupati No 2 Tahun 2015 Penataan Pembinaan Pengawasan Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan Pasrar Modern

Pasar merupakan sebuah tempat dimana jual beli dilaksanakan dan menjadi sebuah tempat pertukaran, penataan pembangunan pasar dengan penuh pertimbangan agar memperoleh kesejahteraan dan keadilan merupakan sebuah perintah agama hal tersebut di jalaskan dalam Firman Allah swt dalam QS an-Nisa 58:

وَيُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَيَرِثُ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ هَدِيدٌ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.⁵⁵

Dengan menentukan sebuah lokasi untuk mendirikan sebuah pasar dengan pertimbangan bahwa dengan adanya bangunan tersebut maka tidak ada ketimpangan yang terjadi pada masyarakat, maka pembangunan tersebut dilakukan secara penuh dengan tanggung jawab.

Pendirian dan penataan pasar tersebut tidak dapat mempengaruhi agama masyarakat, tidak dapat mengganggu jiwa masyarakat, tidak dapat mengganggu akal masyarakat, tidak dapat mengganggu keturunan masyarakat dan tidak dapat mengganggu harta masyarakat.

⁵⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-hadi Media Kreasi. 2014),h. 87.

Kebutuhan *dharuriyat* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan, merajalela kerusakan, dan timbul fitnah dan kehancuran yang hebat. Perkara ini dikembalikan pada *maqashid syariyyah*. Penataan pasar tradisional yang dianggap berdekatan dengan pasar modern menimbulkan *kemadharatan* bagi salah satu pihak yaitu pasar tradisional.

Baik secara langsung maupun tidak langsung penataan pasar modern dan pasar tradisional tersebut akan mengurangi pendapatan atau omset salah satu pihak yaitu pasar tradisional sehingga segalanya beban ditanggung oleh pihak pasar tradisional. Dengan adanya kerugian diantara salah satu pihak maka kemaslahatan tidak tercapai atau terwujud padahal tujuan dari pada ekonomi Islam adalah kemaslahatan. Salah satu persyaratan kemaslahatan yang lebih kongkrit adalah:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat adanya akibat negative yang ditimbulkan. Masalah mursalah itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan kemadharatan dari manusia secara utuh.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu adalah kepentingan umum bukan kepentingan pribadi
3. Sesuatu yang maslahat itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an sunnah atau ijma.
4. Dengan kata lain penataan pasar tradisional harus terlebih dahulu menilai dari sudut manfaat dan tak ada yang dirugikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan izin pendirian toko swalayan di kabupaten Majene kurang efektif dikarenakan masih adanya beberapa pendirian toko swalayan yang melanggar beberapa poin Peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2015 Seperti yang tertuang dalam Pasal 12 ayat 4 huruf (d) yang berbunyi minimarket dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk system jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan dengan syarat dalam satu lingkungan pemukiman, paling banyak 2 (dua) minimarket dengan jarak paling dekat 5 (Lima) Kilometer. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan izin pendirian toko swalayan masih kurang maksimal dengan aturan yang berlaku.
2. Faktor penghambat pelaksanaan efektifitas perda nomor 19 tahun 2015 dan Bentuk Pengawasan dan Penataan Tata Letak Toko Swalayan di Kabupaten Majene ada 2 faktor yaitu kurangnya SDM yang turun langsung dilapangan untuk melakukan pengawasan dan minmnya sosialisasi tentang perda nomor 19 tahun 2015 sehingga masih banyaknya masyarakat yang belum tahu akan adanya perda tersebut dan bentuk pengawasan dilakukan dengan 3 cara pengawasan yang pertama konsepnya adalah laporan, monitoring dan evaluasi namun dalam pelaksanaan pengawasan dan tata letak ditemukan kekurangan didalamnya hal tersebut membuat efek yang begitu besar bagi dunia pasar tradisional dan modern seperti halnya menunggu sebuah laporan dari masyarakat akan

adanya ketidak sesuaian dengan peraturan daerah akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum tahu menahu tentang peraturan daerah nomomor 19 Tahun 2015 tersebut. Dan monitoring dilakukan apabila terdapat pelaporan dari masyarakat semata.

3. Pandangan hukum Islam terhadap penataan pembangunan pasar tradisional di Kabupaten Majene segala aktivitas manusia mempunyai tujuan seperti halnya penataan pasar tradisional merupakan sebuah aktivitas yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, dan tujuan dari pada aktivitas pasar merupakan kemaslahatan ummat manusia terhadap penataan pasar tradisional dan pasar modern yang tak memiliki jarak dapat menimbulkan Kemudaratan dari sebuah efek *Ulil amri* dari keputusan Pemerintah tersebut.

B. Implikasi Penelitian

1. Pendirian izin toko swalayan di kabupaten Majene perlu kiranya adanya sebuah peningkatan diwilayah evalusai pihak pemerintahan sehingga kinerja dalam monitoring dan pemberian izin semakin maksimal dan penambahan pihak pemerintah diwilayah lapangan yang setiap bulan melakukan pengecekan kesetiap pasar tradisional atau modern.
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai peraturan daerah nomor 19 tahun 2015 yang selalu di adakan agar masyarakat ataupun pedagan yang belum tahu tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar menjadi paham sehingga apabila ada sebuah ketidak sesuaian dengan peraturan daerah maka masyarakat bisa dengan cepat memberikan laporan kepada pihak pemrintah.
3. Perlunya perlunya peningkatan pemahaman Islam mengenai pandangan Hukum Islam terhadap penataan pasar yang semestinya membawah kemaslahatan bukan kemudharatan bagi salah satu pihak bagi pelaku usaha

perekonomian pelaku usaha kecil dan menengah agar persaingan usaha seimbang menurut pandangan hukum Islam.



PROFIL HIDUP



ASNAWI, dilahirkan di Majene 28 Agustus 1994, anak ketiga dari empat bersaudara ini adalah putra kandung dari pasangan bapak H. Anwar S.pd.i dan Hj Siti Isah S.Sos. Penulis menempuh Pendidikan di mulai dari SDN 7 Salabose Kabupaten Majene (*lulus tahun 2006*), melanjutkan ke SMP Negeri 1 Majene (*lulus pada tahun 2009*) dan SMA Negeri 2 Majene (*lulus tahun 2012*), dan sekarang menempuh masa kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Program Starata Satu (S1).

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan bagi diri penulis dan memberikan referensi bagi teman-teman yang mengambil judul yang sama dengan penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perda No 19 Tahun 2015 Dalam Izin Pendirian dan Penataan Tata Letak Swalayan di Kabupaten Majene.**

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Gunawan, Imam, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hikmat, H, Stategis Pemberdayaan Masyarakat. Humaniora Masyarakat Press, 2001.
- HR, Ridawn, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006.
- Huma, Proses Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Toeri & Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Karim, Adiwarmen A, Ekonomi Mikro Islami, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Kementrian Agama
- Latif, Abdul, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Ujung Pandang: Umitoha Ukhuwah Grafika, 1997.
- Meihardja Adi, hikmat H (2001). Participatory research apparaisal dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat : modul latihan. Humaniora utama Press (HUP).
- Misdayanti dan Karta,Sapoetra, Funsu Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Muhammad, Summa Amin, Tafsir ayat ekonomi: teks terjemahan dan tafsir (Jakarta Amsah, 2015).
- Pasal 1 Nomor 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12 2008 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan Toko Modern.
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perlindungan, pemberdayaan pasar Tradisional dan Pasar Modern Pasal 12 13 dan `14.
- Peraturan Bupati No 12 Tahun 2015 Penataan Pembinaan Pengawasan Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan Pasar Modern pasal 13
- Raharjo Sujibto, Ilmu Hukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.
- Republik Indonesia Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Pasal 15.
- Republik indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 Ayat 2
- Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Jakarta: PT Grapindo Persada, 2003.
- Soejito, Irwan, Pengawasan Terhadap Pertaturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Jakarta: PT Bina Akasara, 1983.

- Sunarsono, Siswanto, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sunindhia, Praktek Penyelenggaraan Pemetintah Di Daerah, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996.
- Sutrisno, Hady, Metodepenelitian, Yogyakarta: PustakaPelajar, 1986.
- W.J.S, Poerwarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Wibowo, Sukarno dan Supriadi, Dedi, Ekonomi Mikro Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Widjaja, H.A.W, Otonomi Desa, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Yasin, Sulkan dan Sunarto, Haosonyo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru Surabaya: Mekar, 2008.
- Zarkasi, Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, <http://Onlin-Jurnal.uja.ac.id>. 30 Juli 2018.

WEB

- Mandar News, Pendirian pasar modern di Kota Majene 10 Agustus 2018.
- Mandarnews.com diakses pada tanggal 17 Agustus 2018.
- Fuadi, Suud, Mekanisme Pasar Islami dan Pengadaian Harga, Jurnal di akses pada tanggal (4 November 2018).
- [Http://damimpen.blogspot.co.id/2013/070ekonomi mikro islam.html](http://damimpen.blogspot.co.id/2013/070ekonomi mikro islam.html)

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta: PT Grapindo Persada, 2003.
- Amin suma, Muhammad, *Tafsir ayat ekonomi: teks terjemahan dan tafsir* Jakarta Amsah, 2015.
- Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, yogyakarta: BFEF, 2002.
- Faizal, Henry, *Ekonomi Manajerial*, Jakarta: Raja Grafindo persada 2007.
- Fatmawati, *Analisis Dampak Keberadaan Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Maros*, Skripsi.Makassar: Unhas, 2014)
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017
- Hasan, Saifullah, *Peran Pemerintah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Makassar*, Skripsi.Makassar: Unhas, 2014
- Hikmat, H, *Stategis Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Masyarakat Press, 2001.
- HR, Ridawn, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006.
- Huma, *Proses Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Toeri & Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Karim, Adiwarmen A, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Kementrian Agama *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Al-hadi Media Kreasi. 2014.
- Komisi Pengawasan Persaingan Usaha RI, *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*, Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha RI, 2011
- Latif, Abdul, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Ujung Pandang*: Umitoha Ukhuwah Grafika, 1997.
- Malano, Herman *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Medias, Fahmi. SEI. MSI, *Ekonomi Mikro Islam*,Magelang: Unimma Press, 2018
- Meihardja Adi, hikmat H, *Participatory research appraisals dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat : modul latihan*. Humaniora utama Press HUP. 2001

Misdayanti dan Karta, Sapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Raharjo Sujibto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soejito, Irwan, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Jakarta: PT Bina Akasara, 1983.

Sunarsono, Siswanto, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah Di Daerah*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Sutrisno, Hady, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.

Syukur, Abdullah, Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan, Ujung Pandang: Persadi. 1987.

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

W.J.S, Poerwarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Wibowo, Sukarno dan Supriadi, Dedi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Widjaja, H.A.W, *Otonomi Desa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Yasin, Sulkan dan Sunarto, Haosonyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru Surabaya: Mekar, 2008.

Undang-Undang/Peraturan daerah

Pasal 1 Nomor 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12 2008 Tentang Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan Toko Modern.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perlindungan, pemberdayaan pasar Tradisional dan Pasar Modern Pasal 12 13 dan 14.

Peraturan Bupati No 12 Tahun 2015 Penataan Pembinaan Pengawasan Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan Pasar Modern pasal 13

Republik Indonesia Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Pasal 15.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 Ayat 2

WEB

Fuadi, Suud, *Mekanisme Pasar Islami dan Pengadaian Harga*, Jurnal di akses pada tanggal (4 November 2018).

[Http://damimpen.blogspot.co.id/2013/070ekonomi mikro islam.html](http://damimpen.blogspot.co.id/2013/070ekonomi%20mikro%20islam.html)

Mandar News, *Pendirian pasar modern di Kota Majene* 10 Agustus 2018.

Mandarnews.com diakses pada tanggal 17 Agustus 2018

Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, <http://Onlin-Jurnal.uja.ac.id>. 30 Juli 2018.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ALAUDDIN
MAKASSAR



(Wawancara dengan bapak Aco Mursalim, S.sos,. M.Si *Kasi Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu*. 15 Juni 2019)



(Wawancara dengan ibu Subriah S,Ag *Kasih data dan informasi Dinas Penanaman Modal Satu Pintu*, di Kantor DPMSP Majene pada 16 Juni 2019)



(Wawancara dengan bapak Harli, S.E kasi analisis hasil pengaduan dan pengawasan masyarakat, wawancara di kantor dinas penanaman modal terpadu



(Wawancara dengan bapak Jumaing (48 Tahun) Masyarakat dan pedagang kaki lima, wawancara di pasar tradisional Majene pada tanggal 15 Juni 2019)



(Wawancara dengan Ibu Nuraida (52 Tahun) Pedagang Kaki Lima, wawancara di area Pusat Pertokoan Kabupaten Majene, 15 Juni 2019)



(Wawancara dengan bapak Muhajir (45 Tahun) Pedagang Pasar Tradisional, wawancara di Pasar Sentral Kabupaten Majene, 15 Juni 2019)



(Risman (35 Tahun) Pedagang kaki lima, wawancara di Kabupaten Majene ,15 Juni 2019)



BUPATI MAJENE

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

**PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL,
DAN PENATAAN PASAR MODERN DI KABUPATEN MAJENE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang: a. bahwa dengan semakin berkembangnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilindungi dan diberdayakan agar dapat tumbuh serta berkembang secara serasi, sinergi dan bersaing secara sehat;

b. bahwa agar pasar rakyat dapat berkembang secara serasi ditengah-tengah pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, maka perlu dilakukan pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap pasar rakyat serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko swalayan;

c. bahwa sejalan dengan perkembangan daerah dan meningkatnya aktivitas perdagangan masyarakat serta untuk mengoptimalkan fungsi Pasar Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan, diperlukan Pasar Daerah yang aman, nyaman dan tertib bersinergi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan lainnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat, dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Majene;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 15);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL, DAN PENATAAN PASAR MODERN DI KABUPATEN MAJENE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.

2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
4. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan toko swalayan, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
5. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/ tempat agar dapat bersaing dengan toko swalayan.
6. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar rakyat maupun toko swalayan dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Minimarket adalah sarana atau tempat untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
13. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
14. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan

pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri dari atas toko swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.

15. Grosir/perkulakan adalah suatu toko modern yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir) dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan, dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m² (lima ribu meter per segi).

16. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

17. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha menengah dan usaha besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

18. Peraturan Zonasi adalah ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana detail tata ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penggolongan Pasar;
- b. Perlindungan Pasar Rakyat;
- c. Pemberdayaan Pasar Rakyat;
- d. Penataan Toko Swalayan; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Paragraf 1

Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan kedudukan;
- d. Kemitraan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kelestarian lingkungan;
- g. Kejujuran usaha; dan
- h. Persaingan sehat.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan toko swalayan, bertujuan untuk:

- a. mengatur, melindungi dan memberdayakan pasar rakyat dan toko swalayan;
- b. mewujudkan sinergi dan menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat dan pelaku usaha toko swalayan; dan
- c. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran di daerah.

BAB III

PENGGOLONGAN PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Pasar Rakyat

Pasal 5

Usaha-usaha Pasar Rakyat dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:

- a. Pasar Lingkungan;
- b. Pasar Desa;
- c. Pasar Rakyat Kota;
- d. Pasar Khusus; dan
- e. Pasar Rakyat lainnya.

Pasal 6

Berdasarkan pengelolaannya, Pasar Rakyat diklasifikasikan menjadi: pengelolaannya meliputi:

- a. Pasar Provinsi;
- b. Pasar Kabupaten; dan
- c. Pasar Desa.

Pasal 7

Berdasarkan fasilitas yang dimiliki Pasar Rakyat diklasifikasikan menjadi:

- a. Pasar Tipe A;
- b. Pasar Tipe B;
- c. Pasar Tipe C;
- d. Pasar Tipe D; dan
- e. Pasar Tipe E.

Bagian Kedua

Toko Swalayan

Pasal 8

(1) Toko Swalayan terdiri atas:

- a. Pusat perbelanjaan;
- b. Minimarket;
- c. Supermarket;
- d. Department Store;
- e. Hypermarket; atau
- f. Grosir yang berbentuk perkulakan.

(2) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, seperti mall, supermall, plaza, dan sebagainya.

(3) Toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran.

BAB IV

PENDIRIAN DAN PERIZINAN

PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Pendirian Pasar Rakyat

Pasal 9

(1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah, dan rencana detail tata ruang wilayah, termasuk peraturan zonasinya.

(2) Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) dalam Kabupaten.

Pasal 10

(1) Pendirian Pasar Rakyat dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Swasta; atau
- d. Badan Usaha Milik Daerah.

(2) Pendirian Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dengan:

- a. Perorangan;
- b. Kelompok Masyarakat;
- c. Badan Usaha; atau
- d. Koperasi.

Pasal 11

(1) Pendirian Pasar Rakyat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat lainnya, Toko Swalayan serta usaha kecil termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan.

b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat.

~ 8 ~

c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

d. melakukan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami.

(2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.

Bagian Kedua

Pendirian Toko Swalayan

Pasal 12

(1) Lokasi pendirian toko swalayan wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah, termasuk peraturan zonasinya.

(2) Toko Swalayan dapat berada di satu lokasi dengan Pasar Rakyat.

(3) Toko Swalayan yang berada satu lokasi dengan Pasar Rakyat harus dikelola berdasarkan konsep kemitraan.

(4) Lokasi pendirian Toko Swalayan ditentukan sebagai berikut:

a. Perkulakan hanya dapat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder;

b. Pusat perbelanjaan dan hypermarket:

1. Hanya dapat berlokasi pada akses jaringan jalan arteri atau kolektor;

2. Dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan di dalam kota/perkotaan; dan

3. Pendiannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan.

c. Supermarket dan Departemen Store:

1. Dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan

2. Dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.

d. Minimarket dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan dengan syarat dalam satu lingkungan pemukiman, paling banyak 2 (dua) minimarket dengan jarak paling dekat 5 (lima) Kilometer.

(5) Pendirian baru toko swalayan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 13

(1) Pendirian Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. menyediakan fasilitas yang menjamin toko swalayan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- c. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dan menengah, pada posisi yang saling menguntungkan;
- d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan, dan
- e. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna toko swalayan.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Toko Swalayan harus:

- a. memperhatikan jarak dengan pasar rakyat dan antara toko swalayan dengan toko swalayan lainnya;
- b. ketentuan tentang jarak antara pasar rakyat dan antara toko swalayan dengan toko swalayan lainnya diatur paling dekat 5 (lima) Kilometer;
- c. memenuhi syarat pendirian bangunan terutama berkaitan dengan lingkungan hidup.

(3) Syarat pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembangunan harus di dahului dengan studi mengenai dampak lingkungan;
- b. Dokumen rencana rincian teknis harus mengacu pada ketentuan intensitas bangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang wilayah;
- c. Mempunyai izin gangguan; dan
- d. Selama proses pembangunan tidak menimbulkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sekitar.

Pasal 14

Batasan luas lantai penjualan toko swalayan ditentukan sebagai berikut:

- a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);

- b. Supermarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter per segi);
- c. Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi); dan
- e. Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).

~ 10 ~

Bagian Ketiga

Perizinan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan

Pasal 15

(1) Untuk melakukan usaha Pasar Rakyat dan Toko Swalayan wajib memiliki izin yang terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) untuk Pasar Rakyat;
- b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan; dan
- c. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) untuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermart dan perkulakan.

(2) Izin Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan menengah setempat.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh bupati.

(4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:

- a. Studi kelayakan sosial ekonomi;
- b. Analisa mengenai dampak lingkungan dan sosial ekonomi;
- c. Skema pola kemitraan dengan pelaku usaha kecil menengah, koperasi, dan Pasar Rakyat; dan
- d. Surat Izin usaha/peruntukan lahan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Kamar Dagang dan Industri Daerah, asosiasi, anggota masyarakat, pedagang kecil, menengah dan koperasi dapat memberikan saran dan masukan kepada Bupati terhadap rencana pendirian Pasar Rakyat atau Toko Swalayan di wilayahnya.

BAB V

SISTEM PENJUALAN DAN BARANG DAGANGAN TOKO SWALAYAN

Pasal 17

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko swalayan ditentukan sebagai berikut:

- a. Minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
- b. Department store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen, dan
- c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat

Paragraf 1

Perlindungan Pasar Rakyat

Pasal 18

(1) Dalam rangka perlindungan Pasar Rakyat, Pemerintah daerah berkewajiban:

- a. memberikan prioritas atau jaminan kesempatan untuk memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar rakyat yang telah ada dalam hal dilakukan renovasi atau relokasi;
- b. menjamin keberadaan Pasar Rakyat yang mempunyai nilai sejarah, pariwisata, dan kekhasan daerah di daerah; dan
- c. melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Rakyat.

(2) Prioritas atau jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pemberian fasilitas tempat yang sesuai dan proporsional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian prioritas atau jaminan sebagai dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Pasar Rakyat di daerah yang memiliki nilai sejarah, pariwisata, dan kekhasan daerah tidak dapat diubah menjadi toko swalayan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rangka perbaikan dan/atau pengembangan.

Paragraf 2

Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 20

Dalam rangka pemberdayaan Pasar Rakyat, Pemerintah daerah berkewajiban:

- a. Mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan pembinaan dan meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar rakyat.
- c. Memberikan subsidi dan permodalan kepada pedagang.
- d. Menjaga kesinambungan dan subsidi khusus untuk Pasar Rakyat yang memiliki nilai historis dan kekhasan daerah.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pasar.
- f. Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Mendorong pembangunan pusat distribusi kabupaten, dan
- h. Memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan pedagang.

Bagian Kedua

Perlindungan dan Pemberdayaan Toko Swalayan

Paragraf 1

Perlindungan Toko Swalayan

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum pada toko swalayan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemberdayaan Toko Swalayan

Pasal 22

Penyelenggaraan toko swalayan dapat dilakukan dengan menempatkan toko swalayan dan pasar rakyat dalam satu lokasi berdasarkan konsep kemitraan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pasar Rakyat dan Toko Swalayan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pasar Rakyat dilakukan dengan melaksanakan kewajiban perlindungan dan pemberdayaan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Toko Swalayan dilakukan dengan mendorong pengelola Toko Swalayan untuk melakukan pembinaan terhadap Pasar Rakyat.

Pasal 24

Dalam rangka pembinaan, Pemerintah daerah dapat mendorong Pemerintah untuk membangun Pasar Rakyat sebagai percontohan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pasar Rakyat dan Toko Swalayan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. Laporan;

b. Monitoring; dan

c. Evaluasi.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat tentang:

a. Upaya perlindungan terhadap Pasar Rakyat.

b. Upaya pemberdayaan Pasar Rakyat, dan

c. Upaya penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

(5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pelaksanaan perlindungan, pemberdayaan dan penataan, terutama kemitraan antara pasar rakyat dan toko swalayan.

(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk memeriksa kesesuaian isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan hasil monitoring.

Pasal 26

Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi penjualan kepada pengelola Toko Swalayan.



BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 27

Setiap penyelenggara usaha Pasar Rakyat dan Toko Swalayan mempunyai kewajiban antara lain:

- a. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- b. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- c. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha; dan
- d. Menaati ketentuan mengenai tata cara pemasokan barang kepada toko swalayan yang diatur dalam perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap penyelenggara usaha Toko Swalayan wajib:

- a. Menjalin kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil dan menengah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari kapasitas tempat usaha dan komoditi untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah lokal;
- c. Mengutamakan penjualan produk lokal daerah; dan
- d. Menyisihkan sebagian keuntungannya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pasar Rakyat dan Toko Swalayan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 30

Setiap penyelenggara Pasar Rakyat dan Toko Swalayan dilarang:

- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli.
- b. Menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat.
- c. Menimbun dan/atau menyimpan barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan.
- d. Menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. Mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin dari Bupati, dan
- f. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Dalam rangka penataan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Mengatur jumlah toko swalayan dengan memperhatikan jarak yang disyaratkan dan perbandingan jumlah penduduk.
- b. Memberi jaminan kepastian hukum kepada para pedagang di Pasar Rakyat dan pengusaha Toko Swalayan, dan
- c. Mengatur jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX

REKRUTMEN TENAGA KERJA

Pasal 32

- (1) Pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan harus mempekerjakan tenaga kerja warga negara Indonesia, terutama para tenaga kerja lokal.
- (2) Rekrutmen tenaga kerja lokal dilakukan sepenuhnya oleh pihak manajemen toko swalayan dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan sebagai dasar pertimbangan kemampuan dan kompetensi para calon tenaga kerja.
- (3) Untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia, dapat diisi dari tenaga kerja warga negara asing sesuai peraturan perundangundangan.
- (4) Tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari tenaga kerja yang beridentitas kependudukan Daerah dan berdomisili di sekitar lokasi kegiatan paling sedikit 30 % (delapan puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.
- (5) Identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan foto kopi sah kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan domisili dari desa/kelurahan setempat.



BAB X

WAKTU PELAYANAN

Pasal 33

(1) Waktu pelayanan atau jam kerja pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan adalah sebagai berikut:

- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 (sepuluh) waktu Indonesia Tengah (WITA) sampai dengan pukul 22.00 WITA;
- b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 (sepuluh) waktu Indonesia Tengah (WITA) sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WITA.

(2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional, atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan waktu pelayanan/jam kerja melampaui pukul 22.00 (dua puluh dua) WITA.



BAB XI

SANKSI

Pasal 34

(1) Pelaku usaha Pasar Rakyat dan Toko Swalayan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dapat dikenakan sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembekuan izin; dan
- d. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene

pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI MAJENE,
H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene

pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2015 NOMOR 19.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

PROVINSI SULAWESI BARAT 45 TAHUN 2015.